



LKIP

DINAS PPKUKM

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta – Januari 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional, Program dan Indikator Kerja Utama serta Anggaran Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai (a) alat penilaian kinerja, (b) wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada 3 (tiga) urusan bidang pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (c) wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan (d) merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam perencanaan Jangka Menengah, maka masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam mencapai target akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Komitmen semua pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian tujuan organisasi akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Ehasbati Ratu Ranti Abo
NIP. 197009241956032004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 – 2026, telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berbentuk target kinerja hasil, output dan anggaran.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LKIP tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta Perubahannya serta Indikator Kinerja Relevan Lainnya yang tergabung dalam Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang dikaitkan dengan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah ditetapkan, capaian pelaksanaan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah maupun yang terdapat dalam Rencana Strategis dan telah diturunkan ke dalam kinerja individu sesuai dengan tingkatan jabatannya.
3. Sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan walaupun terdapat realisasi dari beberapa Sasaran Strategis yang belum rilis datanya. Dari 17 (tujuh belas) Sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis, 9 (sembilan)



Indikator Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional semua tercapai sesuai target bahkan ada yang di atas target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 102,4%.

4. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah tercapai sesuai dengan target dan mendukung pencapaian sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) telah tercapai sesuai dengan target dan beririsan (cross-cutting) kinerja dengan indikator kinerja yang bersifat strategis lainnya baik di lingkup internal Perangkat Daerah maupun di lingkup internal Pemerintah Daerah
6. Pencapaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran sebagaimana yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta Perubahannya telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Rata-rata Nilai Efisiensi Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebesar 99,10% dengan realisasi anggaran sebesar 93,65%
7. Perangkat Daerah telah mengutilitasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan secara komprehensif mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi secara mandiri, serta seluruh Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
1.4.1 Tugas dan Fungsi	4
1.4.2 Struktur Organisasi	6
1.5 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	11



1.7 SUMBER DAYA.....	14
1.7.1 Sumber Daya Manusia	14
1.7.2 Sarana dan Prasarana.....	16
1.8 KEUANGAN	16
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 20
2.1 RENCANA KINERJA STRATEGIS.....	20
2.1.1 Rencana Kinerja Strategis Pemerintah Daerah.....	20
2.1.2 Rencana Kinerja Strategis Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD).....	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA	33
2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	33
2.2.2 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024	35
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.....	38
2.3.1 Sasaran Kinerja Program.....	38
2.3.2 Rencana Anggaran	41
2.3.3 Aktivitas Prioritas mendukung Sasaran Strategis.....	45
2.4 CROSS-CUTTING KINERJA	46
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 50
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	50



3.2 CAPAIAN RENCANA KINERJA STRATEGIS TAHUN 2024	52
3.2.1 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	52
3.2.2 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024	56
3.2.3 Capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024	61
3.3 REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	67
3.3.1 Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan Tahun 2024	67
3.3.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024	70
3.4 ANALISIS KEMAJUAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	74
3.4.1 Kemajuan Pencapaian Perjanjian Kinerja tiap Triwulan	74
3.4.2 Kemajuan Historis Capaian Perjanjian Kinerja dalam 1 (Satu) Periode Rencana Strategis.....	77
3.4.3 Kemajuan Harapan (<i>Outlook</i>) Capaian Sasaran Strategis	81
3.4.4 Kemajuan Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja dengan Standar Nasional	83
3.5 ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DAYA	85
3.5.1 Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	85
3.5.2 Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.....	91
3.5.3 Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi	92
3.5.4 Analisis Pemanfaatan Anggaran.....	93
3.5.5 Analisis Efisiensi	102
3.5.6 Analisis Pemanfaatan Cross-Cutting Kinerja.....	104
3.6 HAMBATAN DAN DUKUNGAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA	105
3.7 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH	110
3.7.1 Evaluasi Mandiri atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.....	110
3.7.2 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja	116



3.8 PENGHARGAAN TAHUN 2024	120
3.9 RENCANA AKSI TAHUN 2025	127
BAB IV PENUTUP	131
4.1 KESIMPULAN	131
4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9
Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	21
Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	23
Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	39
Gambar 2. 4 Crosscutting Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Kegiatan Strategis Daerah	47
Gambar 2. 5 Crosscutting Kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	49
Gambar 3. 1 Kemajuan Capaian Kinerja Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 tiap Triwulan	66
Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan IV Tahun 2024	69
Gambar 3. 3 Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan mendukung Sasaran Strategis	101
Gambar 3. 4 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja Strategis Perangkat Daerah	117
Gambar 3. 5 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja Program Perangkat Daerah	118
Gambar 3. 6 Dokumentasi Penghargaan Tahun 2024	126



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	10
Tabel 1. 2 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	11
Tabel 1. 3 Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Tahun 2024.....	15
Tabel 1. 4 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan PD/UKPD	16
Tabel 1. 5 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	17
Tabel 1. 6 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis.....	17
Tabel 1. 7 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Program	18
Tabel 2. 1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	24
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	24
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 sesuai kewenangan	26
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	33
Tabel 2. 5 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024	35
Tabel 2. 6 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023-2026 sesuai kewenangan	40
Tabel 2. 7 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan PD/UKPD	43
Tabel 2. 8 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis.....	44
Tabel 2. 9 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Program	44
Tabel 2. 10 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja.....	45



Tabel 3. 1 Kriteria interpretasi Capaian Kinerja	51
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	52
Tabel 3. 3 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024	56
Tabel 3. 4 Narasi Realisasi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 sesuai kewenangan	61
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 – 2024 sesuai kewenangan	64
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	67
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan PD/UKPD	71
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja	72
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis	72
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2023-2024.....	72
Tabel 3. 11 Kemajuan Capaian Perjanjian Kinerja Tiap Triwulan di Tahun 2024	74
Tabel 3. 12 Kemajuan Historis Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023-2024	77
Tabel 3. 13 Kemajuan Harapan (<i>Outlook</i>) Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	81
Tabel 3. 14 Kemajuan Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Standar Nasional	83
Tabel 3. 15 Perbandingan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan eksisting	86
Tabel 3. 16 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan.....	87
Tabel 3. 17 Komposisi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)	88
Tabel 3. 18 Komposisi Register Aset/Modal sampai dengan Tahun 2024	91
Tabel 3. 19 Efisiensi Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program	102



Tabel 3. 20 Hambatan dan Dukungan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	105
Tabel 3. 21 Penghargaan yang diterima sampai dengan Tahun 2024	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ini adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah pada urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari sistem LKIP bagi perangkat daerah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian ini merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kerja Perangkat Daerah. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud LKIP. Penyusunan dokumen LKIP memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan dan permasalahan tentang kinerja penyelenggaraan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 memberikan manfaat bagi pihak internal dan eksternal. Bagi keperluan internal organisasi, dimana laporan ini digunakan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Perangkat Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan, manajemen Perangkat Daerah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas capaian kinerja yang berhasil atau belum berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran telah dicapai selama Tahun 2024.



1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);
15. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
16. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51017);
17. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Lampiran XXVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tercantum pada Bab II, Huruf B, Nomor 1 bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas



menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Lebih lanjut, pada Nomor 2, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- k. Pengoordinasian pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. Pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- m. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- n. Pelaksanaan promosi, penggunaan, dan pemasaran produk unggulan dalam negeri;
- o. Pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;



- p. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- q. Pelaksanaan perlindungan konsumen;
- r. Pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
- s. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- t. Pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang, kalibrasi dan verifikasi standar ukuran dan pengawasan;
- u. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian Kesehatan koperasi;
- v. Pengawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, kemetrologian, usaha mikro kecil dan menengah;
- w. Pemberian rekomendasi perizinan atau nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- x. Pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- y. Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- aa. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
- bb. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- cc. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- dd. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran XXVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tercantum pada Bab II, Huruf C, Nomor 1 bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum; dan



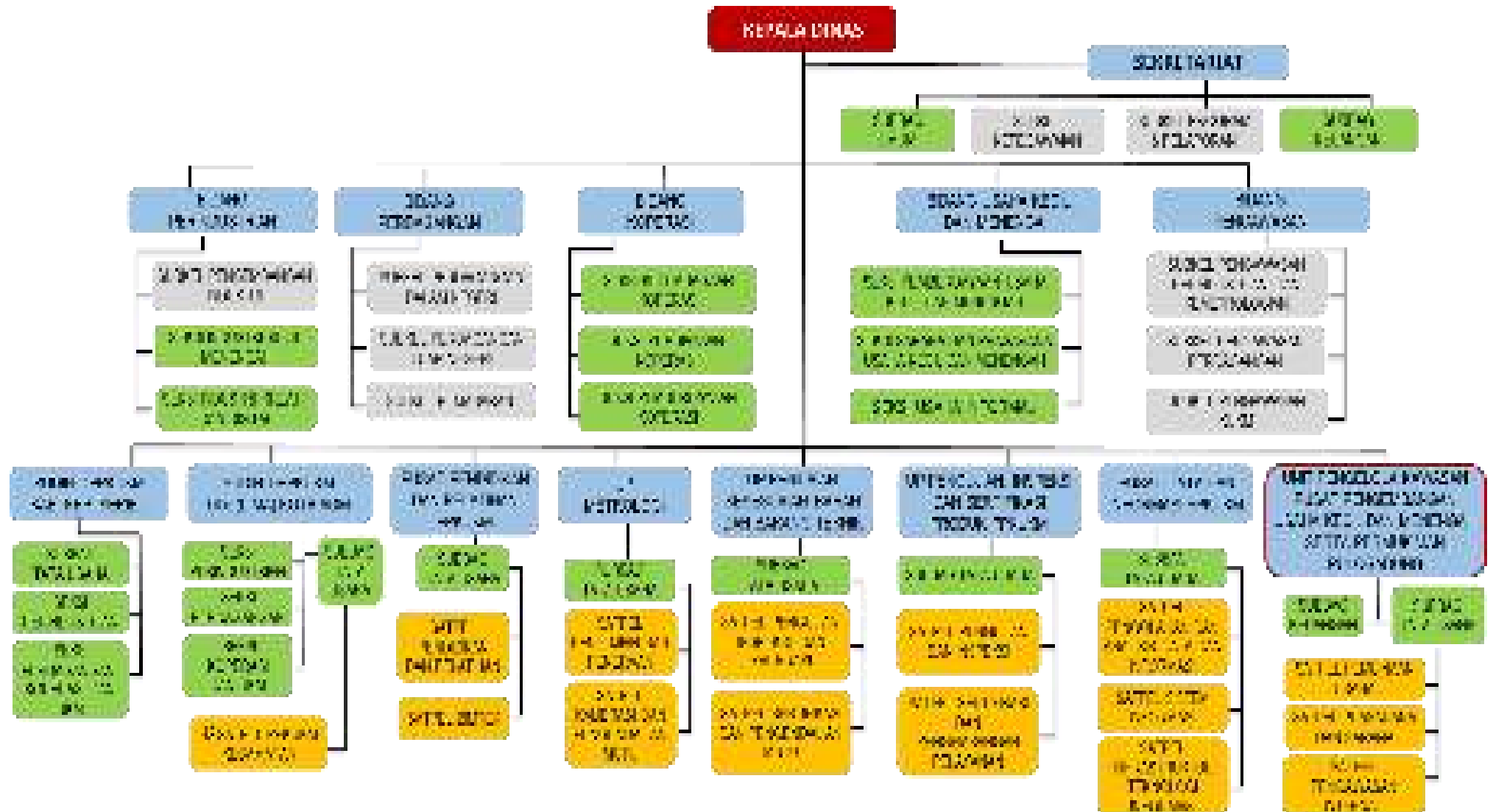
2. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Industri dan Menengah, dan
 2. Seksi Industri Kreatif dan Digital
 - c. Bidang Perdagangan
 - d. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 3. Seksi Pembiayaan Koperasi
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Usaha Informal.
 - f. Bidang Pengawasan;
 - g. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Administrasi, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Perindustrian;
 3. Seksi Perdagangan; dan
 4. Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Perindustrian; dan
 3. Seksi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



Yang membawahi Subbagian Tata Usaha

2. Unit Pengelola Metrologi, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 3. Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 4. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung, terdiri atas:
 - i) Subbagian Tata Usaha, dan
 - ii) Subbagian Keuangan
 5. Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang membawahi Subbagian Tata usaha
- j. Jabatan Fungsional, dan
- k. Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditampilkan dalam Gambar di bawah. Berdasarkan susunan dan bagan organisasi di atas, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama membawahi 18 Jabatan Administrator (JA), 49 Jabatan Pengawas atau setara (terdiri dari 40 Jabatan Pengawas dan 9 Jabatan Ketua Subkelompok), serta 55 Jabatan Kepala Satuan Pelaksana



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



1.5 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran XXVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengampung tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membantu Gubernur untuk mengemban kewenangan di bidang Perindustrian, bidang perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Rendahnya produktivitas dan daya saing perindustrian dalam mendukung perekonomian daerah	Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan industri sektor industri berbasis nilai tambah	Kurangnya fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk dan pemasaran
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri potensial
Rendahnya produktivitas dan daya saing perdagangan dalam mendukung perekonomian daerah	Rendahnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam dan luar negeri	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan perdagangan
		Belum efektifnya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan
		Rendahnya kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap barang beredar dan jasa
		Belum optimalnya Kerja sama perdagangan internasional
		Rendahnya kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen
		Pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar retail modern dalam hal sarana prasarana kenyamanan konsumen
Belum optimalnya peran koperasi dan UKM sebagai aktor utama dalam mencapai	Rendahnya kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UKM	Kurang optimalnya pemberdayaan



1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, melalui Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 Tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi, yaitu 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%), 2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), 3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) dan 4) Evaluasi Internal (bobot 25%).

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperoleh nilai 89,05% dengan Predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,30%
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,00%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	25,00%
TOTAL		100%	89,05%

Implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat diuraikan pada komponen SAKIP sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 27,30% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja yaitu Perkin, Renstra, IKU, Renja, RKA dan DPA
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
- c. Ukuran keberhasilan (indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)
- e. Namun demikian, dalam perencanaan kinerja masih terdapat catatan yaitu belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

B. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 24,0% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan
- b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
- c. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (dalam mengukur capaian kinerja)
- d. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
- e. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja masih terdapat catatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
 - 2) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

C. Pelaporan Kinerja

Komponen pelaporan kinerja dengan bobot 15% memperoleh nilai 12,75% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- b. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- c. Laporan kinerja telah menginformasikan pembahasan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja



d. Namun demikian, dokumen laporan kinerja masih terdapat catatan yaitu dokumen laporan kinerja belum disampaikan tepat waktu

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25% memperoleh nilai 25,00% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. telah terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai
- d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan budaya kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, agar:

1. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan;
2. Melakukan pengukuran kinerja dan menggunakannya sebagai dasar dalam pemberian TPP, dengan melampirkan bukti perhitungan sistem E-TPP secara sampling;
3. Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan
4. Melakukan penyusunan LKIP secara tepat waktu dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor e-0648/RB.05.01 tanggal 9 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan dituangkan di dalam Berita Acara. Melalui surat tersebut, disampaikan bahwa bukti dukung pelaksanaan hasil evaluasi telah diunggah melalui pranala penyimpanan awan milik inspektorat. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut yaitu:

1. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan;



Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah bukti dukung berupa: Undangan dan notulen rapat trajektori target perjanjian kinerja dan penyusunan rencana aksi IKU Perangkat Daerah, undangan dan notulen rapat monitoring dan laporan evaluasi kinerja triwulan II, laporan evaluasi perjanjian kinerja semester I tahun 2024, perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah dan sampel SKP tahun 2024 eselon III, eselon IV dan staf di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Melakukan pengukuran kinerja dan menggunakannya sebagai dasar dalam pemberian TPP, dengan melampirkan bukti perhitungan sistem E-TPP secara sampling;

Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah bukti dukung berupa: Tangkapan layar sampel capaian kinerja eselon II, eselon III, eselon IV dan staf di lingkungan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta;

3. Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan

Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah bukti dukung berupa: telah diunggah bukti dukung berupa: Undangan dan notulen rapat monitoring dan evaluasi kinerja triwulan II, laporan evaluasi perjanjian kinerja semester I tahun 2024 dan laporan evaluasi rencana kerja triwulan I tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4. Melakukan penyusunan LKIP secara tepat waktu dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah bukti dukung berupa: Tangkapan layar unggahan dokumen LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 di web esr.menpan.go.id.

1.7 SUMBER DAYA

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Tenaga Ahli.



Jumlah Pegawai PD/UKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sebanyak 286 orang ASN yang terdiri dari 274 PNS dan 12 PPPK serta 885 PJLP, yang tersebar di Dinas, 6 (enam) suku Dinas Wilayah Kota/Kabupaten dan 6 (enam) UPT di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1. 3 Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Tahun 2024

No	PD/UKPD	PJLP	PPPK	PNS					
				Jabatan Pelaksana	Kepala Satuan Pelaksana	Eselon IV/ Ketua Subkelompok	Eselon III	Eselon II	Total PNS
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	65	7	50	-	18	5	1	74
	Sekretariat	51	-	21	-	4	1	1	27
	Bidang Perindustrian	6	-	5	-	3	1		9
	Bidang Perdagangan	-	2	7	-	3	1		11
	Bidang Koperasi	-	-	4	-	3	1		8
	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	8	-	8	-	3	1		12
	Bidang Pengawasan	-	5	5	-	2	-		7
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	127	-	5	7	2	1	-	15
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	100	-	6	6	3	1	-	16
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	138	-	7	8	4	1	-	20
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	121	-	7	10	4	1	-	22
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	191	-	6	10	4	-	-	20
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	16	-	4	-	3	1	-	8
8	Unit Pengelola Metrologi	28	3	38	-	1	1	-	43
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10	-	6	2	1	1	-	10
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	-	-	8	2	1	1	-	12
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	32	1	12	2	1	1	-	16
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	57	1	10	2	1	1	-	14
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	2	3	1	1	-	7
	TOTAL	885	12	161	52	44	16	1	274



1.7.2 Sarana dan Prasarana

Di samping Sumber daya manusia untuk mendukung tugas-tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut, juga terdapat Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu terus ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya sesuai kebutuhan, seiring dengan meningkatnya dinamika kompleksitas persoalan pembangunan untuk mendukung peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.8 KEUANGAN

Pendanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 beserta perubahannya berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Insentif Fiskal.

Pagu Belanja pada PD/UKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Periode Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026, yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 1. 4 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan PD/UKPD

No	PD/UKPD	Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	181.932.415.758	158.180.092.197	188.165.219.861	183.230.388.135
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	55.264.717.236	31.194.088.241	25.158.611.718	26.203.368.766
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	27.497.066.048	25.003.217.776	20.721.474.629	21.457.305.497
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	58.960.754.827	32.311.024.369	27.821.055.939	28.334.210.133
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	40.185.205.357	36.781.298.416	27.381.646.014	28.119.803.350
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	46.429.145.676	42.341.300.094	33.738.062.318	34.328.833.206
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	9.053.182.432	4.695.698.105	4.950.707.460	4.895.670.637



No	PD/UKPD	Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
8	Unit Pengelola Metrologi	24.675.153.997	23.881.949.983	7.707.190.929	7.631.662.646
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.788.123.942	2.742.555.433	4.662.945.803	4.417.862.199
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	10.620.984.574	10.011.265.486	12.894.993.064	13.803.047.625
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	12.325.452.074	8.806.177.904	6.418.505.049	6.406.859.303
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10.157.817.355	9.660.839.874	7.827.647.018	7.616.019.221
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.521.723.175	5.333.435.633	3.765.470.288	3.159.921.292
	TOTAL	487.411.742.451	390.942.943.511	371.213.530.090	369.604.952.010

Tabel 1. 5 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
5.1.01	Belanja Pegawai	130.152.401.178	123.123.195.000	143.249.306.633	131.917.143.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.618.997.609	253.836.464.371	217.898.924.250	223.603.296.778
5.1.05	Belanja Hibah	3.215.104.600	3.215.104.600	3.029.180.543	3.029.180.543
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.225.362.148	10.192.916.016	5.682.144.584	9.057.612.219
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.127.993.316	568.803.324	1.353.974.080	1.997.718.870
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.423.400	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.460.200	6.460.200	-	-
	TOTAL	487.411.742.451	390.942.943.511	371.213.530.090	369.604.952.010

Tabel 1. 6 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan		147.458.798.820	110.538.966.368	65.597.605.224	66.707.296.217
	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	147.458.798.820	110.538.966.368	65.597.605.224	66.707.296.217
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan		61.245.966.587	48.389.858.036	44.027.007.921	55.276.957.615



Sasaran	Indikator	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	61.245.966.587	48.389.858.036	44.027.007.921	55.276.957.615
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	278.852.423.233	232.159.565.296	261.588.916.945	247.620.698.178
	Jumlah koperasi yang berkualitas	769.607.240	464.423.280	1.662.128.144	997.765.031
	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	278.082.815.993	231.695.142.016	259.926.788.801	246.622.933.147
	TOTAL	487.411.742.451	390.942.943.511	371.213.530.090	369.604.952.010

Tabel 1. 7 Sandingan Pagu Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Program

Kode	Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBD-P	APBD	APBD-P
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	210.188.070.768	188.905.756.094	194.553.423.971	181.050.903.519
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	24.600.000	10.800.000	7.800.000	7.800.000
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	211.847.280	1.000.250.643	748.445.752
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	533.159.960	241.776.000	654.077.501	241.519.279
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	67.749.299.036	42.643.939.733	65.139.768.551	65.338.433.349
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	145.446.189	145.446.189	233.596.279	233.596.279
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	-	6.324.124.712	254.161.378	254.161.378
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	7.533.150.331	6.324.124.712	6.115.532.175	6.485.224.350
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	7.933.748.819	7.869.452.046	7.871.097.189	7.762.410.578
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	45.633.621.248	34.050.835.089	29.786.217.179	40.775.161.309
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	147.407.986.470	110.534.654.018	65.587.797.475	66.697.488.468
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.812.350	4.312.350	9.807.749	9.807.749
	Total	487.411.742.451	390.942.943.511	371.213.530.090	369.604.952.010

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan



Dalam bab ini diuraikan gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB 2 : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan mengenai rencana kinerja strategis yang diampu dan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran beserta cascading dan keterkaitan antar Rencana Kinerja Strategis yang mendukung satu sama lainnya.

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan mengenai metodologi pengukuran kinerja yang digunakan, Capaian Rencana Kinerja Strategis, Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran, Analisis Kemajuan Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis Penggunaan Sumber Daya, Hambatan dan Dukungan Pencapaian Perjanjian Kinerja, Evaluasi atas Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penghargaan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tahun 2025.

BAB 4 : Penutup

Menjelaskan Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi menyeluruh dari laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

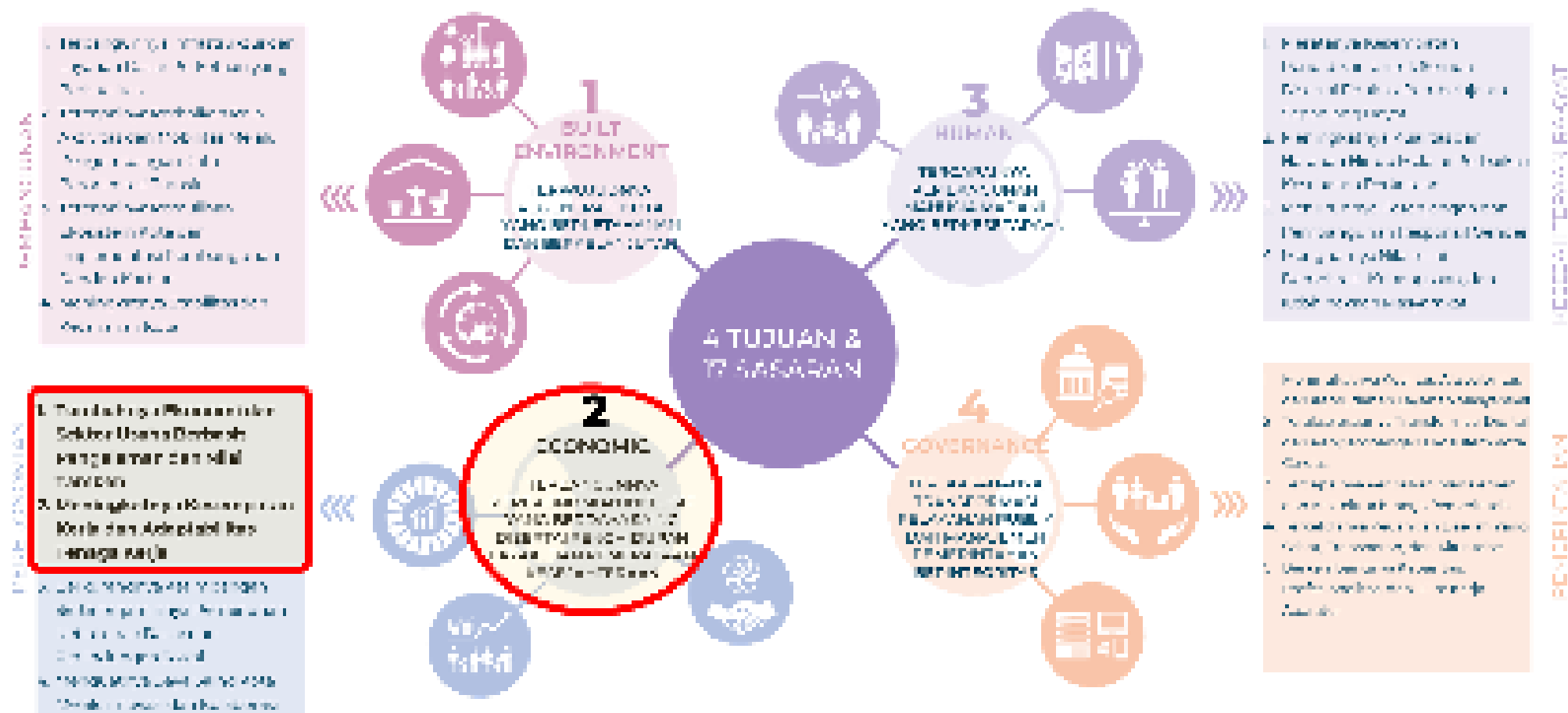
2.1 RENCANA KINERJA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah. Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seperti yang telah dijelaskan pada Bab I. Permasalahan tersebut diformulasikan untuk menentukan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan terangkum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026

2.1.1 Rencana Kinerja Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan Kinerja Strategis tingkat Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dan turunan dari Perencanaan Kinerja Strategis Pemerintah Daerah. Perencanaan Kinerja Strategis Pemerintah Daerah telah dirumuskan melalui Rencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, telah dirumuskan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada rentang waktu 2023-2026. Pohon kinerja strategis Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik di bawah.

Dari 4 tujuan strategis dan 17 sasaran strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendukung pencapaian Tujuan Strategis 2, yaitu Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan, serta mendukung 2 (dua) Sasaran, yaitu 1) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah dan 2) meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.



Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

2.1.2 Rencana Kinerja Strategis Perangkat Daerah

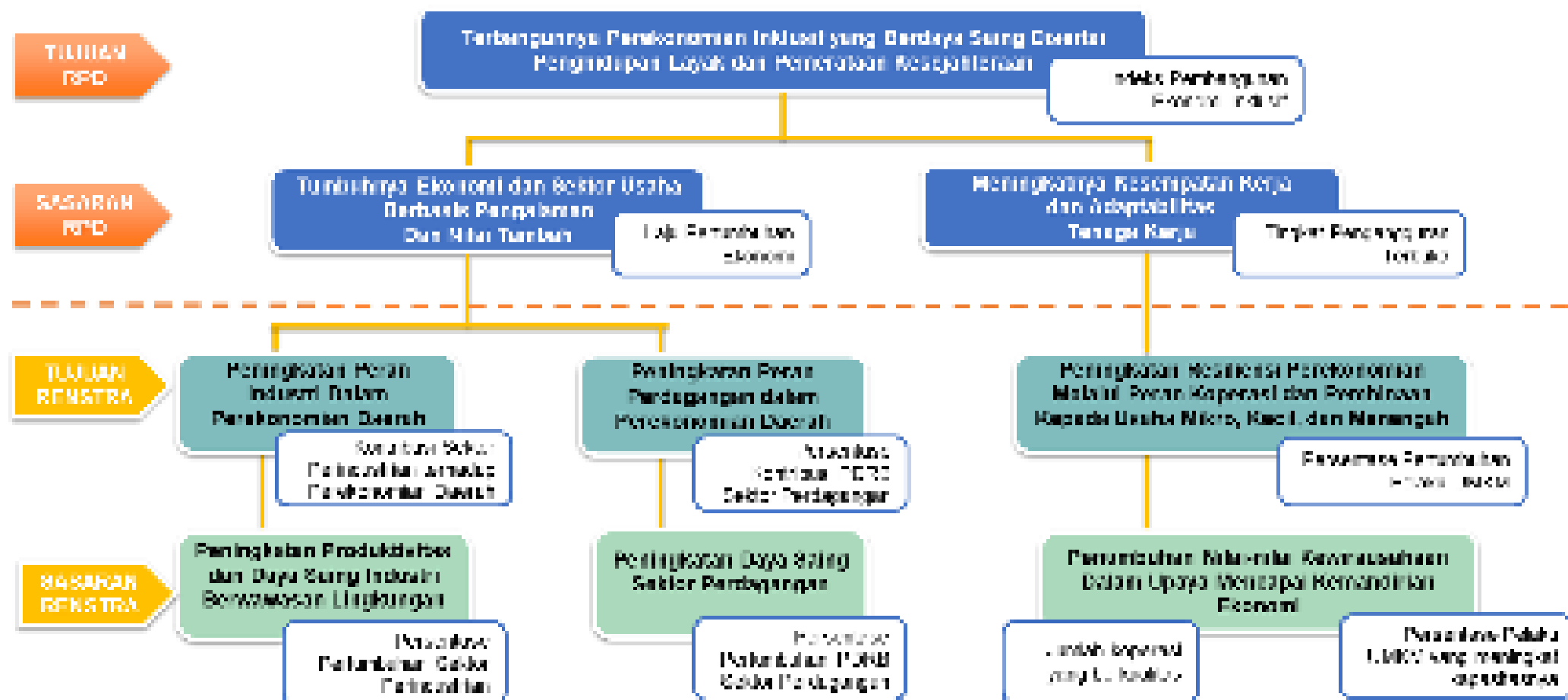
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 tersebut serta Isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran



strategis pada 3 (tiga) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| Tujuan | 1. | Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah |
| dengan sasaran: | 1.1 | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan |
| Tujuan | 2. | Peningkatan Peran Perdagangan dalam Perekonomian Daerah |
| dengan sasaran: | 2.2 | Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan |
| Tujuan | 3. | Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| dengan sasaran: | 3.3 | Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi |

Hubungan pohon kinerja strategis pemerintah daerah dan pohon kinerja strategis perangkat daerah beserta masing-masing indikatornya dapat ditunjukkan pada grafik di bawah.



Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Indikator dan target Tujuan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023-2026 tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 2. 1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Metadata Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					Awal	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	Definisi: Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap total PDRB Metode Pengukuran: (PDRB Sektor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas/PDRB) x 100% Sumber Data: BPS	%	12,28%	12,3%	12,4%	12,5%	12,6%	12,6%
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	Definisi: Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan adalah persentase PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB. Sektor perdagangan yang menjadi kontributor terhadap PDRB: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Metode Pengukuran: (PDRB Sektor Perdagangan/PDRB) x 100% Sumber Data: BPS	%	16,85%	16,9%	17%	17,1%	17,2%	17,2%
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	Definisi: Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta Kriteria pelaku UMKM adalah seluruh UMKM yang terdaftar di jakpreneur.jakarta.go.id Metode Pengukuran: ((Jumlah pelaku UMKM tahun n - Jumlah pelaku UMKM tahun n-1)/Jumlah pelaku UMKM tahun n-1) x 100% Sumber Data: DPPKUKM	%	52%	4,5%	5%	5,25%	5,5%	5,5%

Indikator dan target Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023-2026 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Metadata indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					Awal	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Peningkatan Produktivitas dan Daya	Persentase Pertumbuhan	Definisi: Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian adalah nilai persentase PDRB Sektor	%	11,01%	6,5%	7%	7,5%	8%	8%



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Metadata indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					Awal	2023	2024	2025	2026	Akhir
	Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Sektor Perindustrian	Industri Pengolahan Nonmigas tahun n dikurangi dengan nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1 dibagi dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1. Metode Pengukuran: ((PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n - PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1)/PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1) x 100% Sumber Data: BPS							
2	peningkatan daya saing sektor perdagangan	persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Definisi: Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah nilai persentase PDRB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1 dibagi dengan PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1. Metode Pengukuran: ((PDRB Sektor Perdagangan tahun n - PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1)/PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1) x 100% Sumber Data: BPS	%	5,46%	5,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%
3	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Definisi: Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan: 1. Bersertifikat NIK 2. Melaksanakan RAT 3. Peningkatan volume usaha dan aset. Metode Pengukuran: Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya Sumber Data: ODS KemenkopUKM dan DPPKUKM	Koperasi	200	50	50	50	50	200
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	Definisi: Persentase Pelaku UMKM yang telah memiliki usaha atau mengalami peningkatan omset, aset dan atau tenaga kerja dan/ atau mengalami peningkatan dengan telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri . Metode Pengukuran: (Jumlah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya / Jumlah Pelaku UMKM Binaan) x 100% Sumber Data: Data Internal (Sistem Jakpreneur)	%	50%	55%	60%	65%	70%	70%



2.1.3 Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Dalam rangka mendorong komitmen keterlibatan Jakarta dalam kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara nasional maupun internasional, mengefektifkan serta mengefisiensikan tata Kelola pemerintah dan layanan public, keikutsertaan dalam pemerataan pembangunan, turut serta dalam sinkronisasi program kebijakan pusat dan daerah serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka telah diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi, dimana juga melingkupi Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Rencana Aksi KSD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengampu 6 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan 11 Sub-KSD, 19 Rencana Aksi, 26 Kriteria Keberhasilan dan 51 target Triwulanan.

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 sesuai kewenangan

No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi		Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target	
1	2	3		4	5	6	7		8
1	KSD 1 : Penanggulangan Banjir Dan Rob	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	8	Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Waduk	DPPKUKM	1. BPAD 2. Dinas SDA 3. Walikota Jakut	Terlaksananya serah terima aset Waduk di 1 lokasi (Waduk Sunter Selatan)	B03	Serah terima aset dari BPAD ke DPPUMKM
2	KSD 3 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi	Pengendalian Inflasi Dan Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Keterjangkauan Harga	DPPKUKM	1. Kota Adm Jakpus 2. Kota Adm Jakut 3. Kota Adm Jakbar 4. Kota Adm Jaksel 5. Kota Adm Jaktim 6. DKPKP	1. Terlaksananya Pasar atau Bazar Murah Menjelang HBKN	B06	Pelaksanaan Pasar Murah di 7 lokasi (DPPKUKM)
3								B12	Pelaksanaan Pasar Murah di 6 lokasi (DPPKUKM)
4	KSD 3 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi	Pengembangan UMKM	1	Pembinaan dan Pengembangan UMKM	DPPKUKM	Biro Perkeu	Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	B06	Laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur
5								B09	Laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur
6					DPPKUKM	1. BPPBJ 2. Biro Perkeu 3. Biro Umum dan Administrasi 4. Biro KDH	Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	B06	1. Update katalog e-order a. DPPKUKM 25 b. DKPKP 11 c. DTKTE 10 d. Disparekraf 5 e. DPPAPP 5 f. Dinsos 5



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
7							B09 1. Update katalog e-order a. DPPKUKM 50 b. DKPKP 22 c. DTKTE 30 d. Disparekraf 10 e. DPPAPP 5 f. Dinsos 5 2. Kurasi produk makan dan minum e-order a. DPPKUKM 20 b. DKPKP 22 c. DTKTE 30 d. Disparekraf 10 e. DPPAPP 10 f. Dinsos 10
8							B12 1. Update katalog e-order a. DPPKUKM 50 b. DKPKP 22 c. DTKTE 20 d. Disparekraf 10 e. DPPAPP 10 f. Dinsos 10 2. Kurasi produk makan dan minum e-order a. DPPKUKM 20 b. DKPKP 22 c. DTKTE 20 d. Disparekraf 10 e. DPPAPP 10 f. Dinsos 10 Keterangan: UMKM baru dan eksisting yang dilakukan kurasi
9				DPPKUKM	1. BPPBJ 2. DKPKP 3. DTKTE 4. Disparekraf 5. Dinas Sosial 6. DPPAPP	Terlaksananya pemerataan pemesanan binaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order	B06 1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM: a. DPPKUKM 20 peserta b. DKPKP 10 peserta c. DTKTE 10 peserta d. Disparekraf 5 peserta e. DPPAPP 5 peserta f. Dinsos 5 peserta
10							B09 1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM: a. DPPKUKM 20 peserta b. DKPKP 10 peserta c. DTKTE 10 peserta d. Disparekraf 5 peserta



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi		Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target	
1	2	3		4	5	6	7		8
									e. DPPAPP 5 peserta f. Dinsos 5 peserta
11								B12	1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM: a. DPPKUKM 20 peserta b. DKPKP 10 peserta c. DTKTE 10 peserta d. Disparekraf 5 peserta e. DPPAPP 5 peserta f. Dinsos 5 peserta
12					DPPKUKM	1. Kota Adm Jakpus 2. Kota Adm Jakut 3. Kota Adm Jakbar 4. Kota Adm Jaksel 5. Kota Adm Jaktim 6. Kab. Adm Kep Seribu 7. Biro Perkeu 8. Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana PKL di 19 titik Loksem: JP: 5 lokasi JU: 3 lokasi JB: 5 lokasi JS: 3 lokasi JT: 2 lokasi KS: 1 lokasi	B03	Persiapan konsep dan administrasi pengadaan
13								B06	Progres proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan
14								B09	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana PKL pada 10 titik Loksem
15								B12	1. Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana PKL pada 9 titik Loksem 2. Laporan Perbaikan Loksem di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten
16			2	Peningkatan UMKM naik kelas	DPPKUKM	Biro Perkeu	UMKM yang naik kelas	B12	Jumlah UMKM yang naik kelas (mengalami kenaikan omzet) 1. DPPKUKM 5400 2. DKPKP 200 3. Disparekraf 100 4. DTKTE 150 5. Dinas Sosial 40 6. Dinas PPAPP 110 Keterangan: Kenaikan omzet berdasarkan data QRIS Jakpreneur selama tahun 2024 (omzet 2024 lebih besar dari omzet 2023)
17						1. Diskominfotik 2. Biro Perkeu 3. PT Bank DKI	Pengembangan dashboard naik kelas	B03	Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai ≥ USD 200)



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
18							B06 1. Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai $\geq$ USD 200) 2. Pengembangan dashboard ekspor di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM) 3. Pengembangan dashboard omzet (qris dan eorder) di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM)
19							B09 Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai $\geq$ USD 200)
20							B12 Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai $\geq$ USD 200)
21	KSD 4 : penanggulangan kemiskinan	percepatan penanggulangan kemiskinan	10 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	DPPKUKM	- Inspektorat - Bappeda - Dinas Sosial - DPPAPP - Disdukcapil - Bapenda - Diskominfo - Biro Kesos - Biro Dikmental - Biro Perkeu - Biro PLH - Biro Pemerintahan	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	B03 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat
22							B06 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat
23							B09 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat
24							B12 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi		Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target	
1	2	3		4	5	6	7		8
									Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat
25		Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	2	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	DPPKUKM	BPBUMD Dinas Sosial DKPKP DTKTE DPPAPP Disparekraf	tersedianya dokumen kebijakan konsesi retribusi penggunaan tempat usaha bagi penyandang disabilitas pada lokasi binaan dan lokasi sementara	B12	1 Draf kebijakan konsesi retribusi penggunaan tempat usaha bagi penyandang disabilitas pada lokasi binaan dan lokasi sementara Keterangan: ruang lingkupnya hanya pada lokasi binaan dan lokasi sementara
26					DPPKUKM	Dinas Sosial DKPKP DTKTE DPPAPP Disparekraf	Pemberian konsesi dalam pembiayaan harga retribusi kios UMKM bagi pelaku usaha penyandang disabilitas	B12	20% UMKM Penyandang Disabilitas Anggota Jakpreneur yang mendapatkan akses kios pada Lokasi Binaan
27			5	Ekonomi Inklusif	DPPKUKM	Dinas Sosial BPPBJ DKPKP DTKTE DPPAPP Disparekraf	Terselenggaranya koordinasi pelatihan binaan jakpreneur kepada seluruh Perangkat Daerah pengampu Jakpreneur	B03	1 Laporan koordinasi pelatihan binaan jakpreneur kepada seluruh Perangkat Daerah pengampu Jakpreneur
28					DPPKUKM	-	Tersedianya bantuan usaha dan akses permodalan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas	B12	10% Persen UMKM Disabilitas binaan Jakpreneur yang mendapatkan akses permodalan
29			6	Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	DPPKUKM	-	Terselenggaranya pelatihan koperasi bagi penyandang disabilitas	B09	7 penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan Perkoperasian
30					DPPKUKM	-	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas	B09	7 penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
31	KSD 9 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	Penyediaan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terintegrasi	24	Penyediaan Kantin Sehat Percontohan di tempat umum (lokasi usaha mikro binaan)	DPPKUKM	Dinkes DKPKP Biro Pemerintahan Biro Kesos, Biro Perkeu Labkesda	10 lokasi usaha mikro binaan melaksanakan kantin sehat	B03	Melakukan survey kantin sehat serta penentuan lokasi pelaksanaan kantin sehat di lokasi usaha mikro binaan
32								B06	Sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan terkait pelaksanaan kantin sehat di lokasi usaha mikro binaan
33								B09	Implementasi kantin sehat di lokasi usaha mikro binaan
34								B12	Evaluasi dan perencanaan di tahun 2025 untuk pelaksanaan kantin sehat di lokasi usaha mikro binaan



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi		Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target	
1	2	3		4	5	6	7		8
35	KSD 7 : Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Iklim	2	Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	DPPKUKM	1. DKPKP 2. Disparekraf 3. DLH 4. Dharma Jaya	Meningkatkan edukasi pada pelaku usaha UMKM dalam mengurangi sampah produksi makanan yang terbuang (food loss)	B09	Sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait edukasi dalam mengurangi sampah produksi makanan yang terbuang (food loss) pada 25 orang peserta
36								B12	Sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait edukasi dalam mengurangi sampah produksi makanan yang terbuang (food loss) pada 25 orang peserta
37	KSD 10 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Transformasi Digital	17	Optimalisasi Layanan Pembinaan Kewirausahaan	DPPKUKM	1. Diskominfo 2. Biro ORB 3. Biro Pemerintahan 4. BPSDM 5. BKD 6. Bappeda	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Pembinaan Kewirausahaan	B09	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan Pembinaan Kewirausahaan memuat : 1. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Pembinaan Kewirausahaan telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk) contohnya : update, upgrade, versioning, patch, Surat Edaran/perubahan landasan hukum dari layanan SPBE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi 2. Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem Pembinaan Kewirausahaan
38			28	Implementasi Manajemen Risiko SPBE	DPPKUKM	1. Biro ORB 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. BPSDM 5. Biro Pemerintahan 6. Biro Hukum 7. BPAD 8. Inspektorat	Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	B12	Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah
39		Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	7	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	DPPKUKM	1. Inspektorat 2. Biro ORB 3. BKD 4. BPKD 5. Bappeda 6. BPPBJ 7. Diskominfo 8. Biro Hukum	Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	B03	Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi		Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target	
1	2	3		4	5	6	7		8
40			10	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	DPPKUKM	Inspektorat	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B06	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%
41								B12	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95% Keterangan: Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%
42		Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Predikat A	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	DPPKUKM	1. Inspektorat 2. BKD 3. Bappeda 4. Biro ORB	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	B03	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)
43								B06	1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024
44								B09	Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024)
45			7	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	DPPKUKM	1. Inspektorat 2. BKD 3. Bappeda 4. Biro ORB	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	B03	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023
46								B06	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024
47								B09	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024
48								B12	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024



No	KSD	Sub KSD	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
49			9 Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	DPPKUKM	1. Inspektorat 2. BKD 3. Bappeda 4. Biro ORB	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B03 1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah 2023 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id
50			10 Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	DPPKUKM	Inspektorat	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B09 Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
51	KSD 9 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan disemua Jenjang Satuan Pendidikan	6 Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	DPPKUKM	1. Dinas Pendidikan 2. DTKTE 3. Biro Dikmental 4. Biro KSD 5. Biro Hukum 6. BPBUMD	1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja) dan Perguruan Tinggi 2. adanya analisis kebutuhan IDUKA 3. terselenggaranya pameran produk SMK	B09 Terlaksananya pelatihan dan praktik kewirausahaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya Perkin, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah untuk menghasilkan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	SASARAN STRATEGIS							
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	N/A	N/A	N/A	12,4	12,4	Persentase



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	N/A	N/A	N/A	17	17	Persentase
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	N/A	2,5	N/A	7,35	7,35	Persentase
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	N/A	N/A	25	25	50	Koperasi
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	N/A	20	40	89	89	Persentase
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	N/A	N/A	N/A	7	7	Persentase
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	N/A	N/A	N/A	5,7	5,7	Persentase
SASARAN KHUSUS								
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100	100	100	Persen
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	5	25	55	100	100	Persen
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	N/A	30	N/A	80	80	Persen
		2. Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	N/A	100	N/A	100	100	Persen
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	50	50	100	Persen
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	N/A	50	N/A	100	100	Persen
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	SASARAN OPERASIONAL							
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100	100	100	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	Persen
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25	25	25	25	100	Persentase

2.2.2 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

Menyadur Insekda No 4 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana aksi Indikator Kinerja Utama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024, Renaksi merupakan uraian tahapan kunci dari IKU yang menghasilkan output antara. Dalam mencapai Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, telah disusun Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah.

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	12.4	RA 1. Pemantauan Industri Prioritas Kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	KK. 1.1 Tersusunnya laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	T/01.1.1 Pelaksanaan FGD Profil Industri Prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan BPS	Tw.1	Kepala Bidang Perindustrian
						T/01.1.2 Dokumen laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perindustrian
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	17	RA 1. Keterjangkauan Harga	KK1.1. Terlaksananya Pasar atau Bazar Murah Menjelang HBKN	T/01.1.1. Pelaksanaan Pasar Murah di 7 lokasi	Tw 2	Kepala Bidang Perdagangan
						T/01.1.2. Pelaksanaan Pasar Murah di 6 lokasi	Tw 4	Kepala Bidang Perdagangan
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	7.35%	RA 1. Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	KK1.1 Terlaksananya keterserapan tamatan SMK melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	T/01.1.1. Terlaksananya pelatihan dan praktik kewirausahaan	Tw 3	Kepala Bidang Perindustrian



NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	50	RA1. Penyusunan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	KK1.1. Tersusunnya Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	T/O1.1.1. Surat Edaran Kepala Dinas Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	TW 1	Kepala Bidang Koperasi
				RA2. Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	KK2.1. Terlaksananya Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	T/O2.1.1. Pelaksanaan FGD dan sosialisasi koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	TW 2	Kepala Bidang Koperasi
				RA3. Temu Mitra Koperasi dengan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	KK3.1. Terlaksananya temu mitra koperasi dengan stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	T/O3.1.1. Pelaksanaan Temu Mitra koperasi dengan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	TW 3	Kepala Bidang Koperasi
				RA4. Optimalisasi Inventarisasi Data Koperasi yang berkualitas	KK4.1. Tersedianya Data Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	T/O4.1.1. Pelaksanaan Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	TW 4	Kepala Bidang Koperasi
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	89%	RA 1. Pembinaan dan Pengembangan UMKM	KK1.1. Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	Tw 2, 3	Kepala Bidang UKM
					KK1.2. Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	T/O1.2.1. Update katalog e-order (25 - 50 - 50)	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan
						T/O1.2.2. Kurasi produk makan dan minum e-order (20 - 20)	Tw 3, 4	
					KK1.3. Terlaksananya pemerataan pemesanan binaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order	T/O1.3.1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan
					KK1.4. Terfasilitasinya UMKM unggulan pada Kegiatan UMKM Expo	T/O1.4.1 Pelaksanaan Kegiatan UMKM Expo	Tw 3	Kepala Bidang UKM
				RA 2. Peningkatan UMKM naik kelas	KK2.1. UMKM yang naik kelas	T/O2.1.1. Jumlah UMKM yang naik kelas (mengalami kenaikan omzet) (5400 UMKM)	Tw 4	Kepala Bidang UKM
					KK2.2. Pengembangan dashboard naik kelas	T/O2.2.1 Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai $\geq$ USD 200)	Tw 1, 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan
						T/O2.2.2 Pengembangan dashboard ekspor di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM)	Tw 2	Kepala Pusdatin



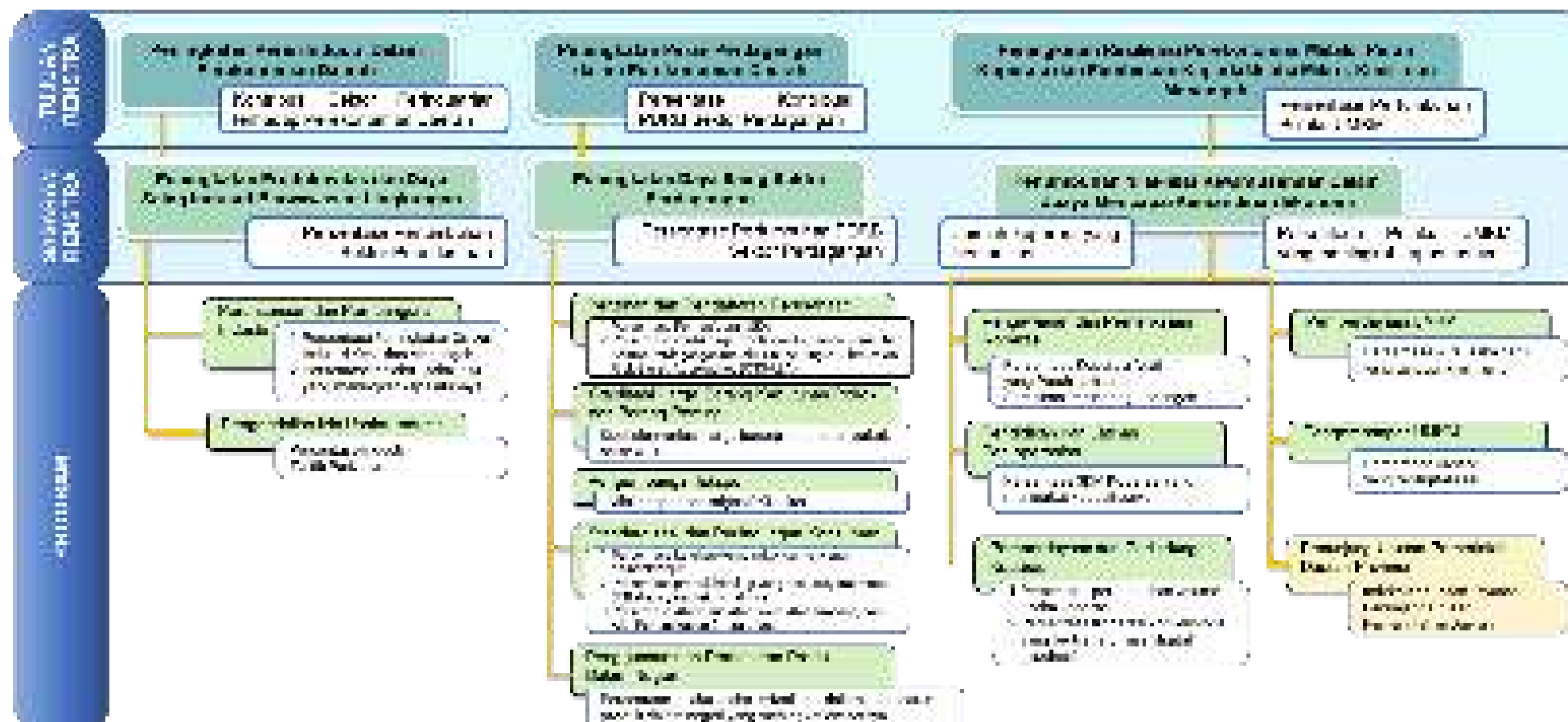
NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC
						T/O2.2.3 Pengembangan dashboard omzet (qris dan eorder) di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM)	Tw 2	Kepala Pusdatin
					KK2.3. Peningkatan jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sesuai dengan target	T/O2.3.1 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp437.540.538	Tw 1	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab
						T/O2.3.2 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607	Tw 2	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab
						T/O2.3.3 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607	Tw 3	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab
						T/O2.3.4 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp3.062.783.765	Tw 4	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	7	RA 1. Pendampingan Penyampaian Laporan Industri melalui SIINas	KK1.1. Terlaksananya pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas	T/O1.1.1 Laporan pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas	Tw 1, 3	Bidang Perindustrian
				RA 2. Pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta	KK2.1. Terlaksananya pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	T/O2.1.1 Laporan pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	Tw 1, 2, 3, 4	Bidang Perindustrian
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5.7	RA 1. Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan	KK1.1 Terlaksananya Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan	T/O1.1.1 Laporan perizinan usaha yang diterbitkan pada sektor perdagangan	Tw 2, 4	Kepala Bidang Perdagangan
				RA 2. Pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	KK2.1. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	T/O2.1.1 Laporan pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	Tw 2, 4	Kepala Bidang Perdagangan



2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

2.3.1 Sasaran Kinerja Program

Dari target sasaran berdasarkan perencanaan kinerja strategis tersebut di atas, dijabarkan kembali ke dalam program dan indikator program yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki kewenangan pada 3 bidang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. masing-masing urusan tersebut memiliki program yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Nomenklatur dan kodefikasi tersebut sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, namun dalam perencanaan penganggaran Tahun 2024 ini masih merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Hubungan pohon kinerja Rencana Kinerja Strategis dengan program yang mendukung dapat tergambarkan pada grafik di bawah.



Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Berdasarkan pohon kinerja program tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu 13 program dan 18 indikator kinerja program. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, terdapat 2 program dan 3 indikator kinerja program yang diampu untuk menunjang sasaran strategis peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, terdapat 5 program dan 8 indikator kinerja program yang diampu untuk menunjang sasaran strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 6 program dan



7 indikator kinerja program yang diampu untuk mendukung sasaran strategis Penumbuhan Nilai-Nilai Kewirausahaan Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi. Target masing-masing indikator program selama periode tahun 2023-2026 sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2. 6 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023-2026 sesuai kewenangan

No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	$((\text{Jumlah omzet tahun 2023 dikurangi Jumlah omzet tahun 2022}) / \text{dibagi Jumlah omzet tahun 2022}) \times 100\%$	%	3,5	4	4,5	5
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	$(\text{Jumlah pelaku usaha IKM yang meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi pasca diberi pelatihan dibagi Total jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti pelatihan}) \times 100\%$	%	50	55	60	65
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Tertib Perizinan	Jumlah industri yang tertib perizinan tahun 2023 dibagi total izin usaha industri tahun 2022 x 100%	%	55	60	65	70
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pemanfaatan SKA	$(\text{nilai ekspor yang diterbitkan memanfaatkan SKA dibagi Nilai ekspor melalui Jakarta}) \times 100\%$	%	60	61	62	63
		Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)	Jumlah Perusahaan diverifikasi dibagi jumlah permohonan perizinan berusaha	%	70	75	80	85
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Koefisien variasi dihitung dari standar deviasi dibagi rata-rata harga komoditi (Permendagri 18 th 2020)	Koefisien	14	14	14	14
5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta (USD)	Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2023	USD	11.427 .794 .400	11.542 .072 .344	11.657 .493 .067	11.774 .067 .998
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	$(\text{Jumlah keluhan atau temuan yang masuk dibagi jumlah temuan atau keluhan yang ditindaklanjuti}) \times 100\%$	%	100	100	100	100
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	$(\text{jumlah produk hasil uji yang lolos syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya dibandingkan dengan SNI atau syarat mutu produk sesuai komoditi dan parameternya}) \times 100\%$	%	80	81	82	83
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	$(\text{Jumlah alat ukur, timbangan dan alat perlengkapan yang ditera ulang dibandingkan dengan jumlah permohonan alat UTTP}) \times 100\%$	%	100	100	100	100
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	$(\text{Jumlah pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya dibagi jumlah pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri}) \times 100\%$	%	20	30	40	50



No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target			
					2023	2024	2025	2026
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	(Jumlah koperasi aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah koperasi) x 100%	%	57	60	63	65
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	(Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian pasca diberi pelatihan dibagi Total jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan) x 100%. Dengan membandingkan nilai pre-test & post test	%	50	60	65	70
10	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	((Volume usaha koperasi tahun 2023 dikurangi Volume usaha koperasi tahun 2022) dibagi Volume usaha koperasi tahun 2022) x 100%	%	2	2	2	2
		Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	Jumlah koperasi modern bertransformasi digital dibagi jumlah koperasi aktif x 100%.	%	0,47	0,48	0,49	0,50
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	(Jumlah wirausaha yang mendapatkan fasilitasi pelatihan, pemasaran dan permodalan dibagi jumlah wirausaha baru (P1)) x 100%	%	2,5	3	3,5	4
12	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	(Jumlah UMKM yang sudah terdigitalisasi dibagi jumlah UMKM) x 100%	%	70	80	90	100
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Layanan Penunjang	Indeks	4	4	4	4

2.3.2 Rencana Anggaran

Total anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 371.213.530.090. Pendanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 beserta perubahannya berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Insentif Fiskal (IF). Pendanaan DAK Non-Fisik digunakan untuk membiayai aktivitas pembinaan koperasi dan UKM di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pendanaan BLUD digunakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas di BLUD Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung.



Pada Tahun 2024 terdapat beberapa fase perubahan anggaran, pada APBD Pergeseran I Tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak ambil bagian dan tidak mengalami perubahan anggaran.

Berdasarkan APBD Pergeseran II Tahun 2024, terjadi perubahan anggaran dengan komposisi sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Kegiatan, Pelatihan, Pendampingan Usaha Mikro Kecil, Pendampingan Koperasi, Layanan bantuan dan Pendampingan Hukum serta Inkubasi melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024, terdapat Pergeseran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu:
 - a. Pergeseran Aktivitas dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke Bidang Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada rincian Konsultasi Bantuan Hukum, sehingga menambah Subkegiatan baru di Dinas
 - b. Perubahan rincian aktivitas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Penambahan Subkegiatan baru di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Pergeseran Kode Rekening di Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS untuk mengakomodir Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) di Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik dan Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah akibat pelantikan 12 orang Jabatan Fungsional (JF) PMB yang baru sebesar Rp.150Jt
3. Pergeseran anggaran Penataan Sarpras PKL di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah pada 5 (lima) Wilayah Kota

Pada Fase APBD Perubahan Tahun 2024, terdapat perubahan anggaran, baik yang bersumber melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Insentif Fiskal (IF). Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung sebagai BLUD di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 13.803.047.625 dalam rangka penyesuaian rencana belanja dengan proyeksi pendapatan dan penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD. Lebih lanjut terkait IF, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 353 Tahun 2024 Tanggal 1 September 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI mendapatkan Dana Alokasi Insentif Fiskal TA DKI Jakarta atas kinerja kategori Penghapusan



Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp. 5.778.438.000 dan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 5.953.576.000. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan usulan sebesar Rp. 7.433.555.317. Pagu Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 tersaji dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 7 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan PD/UKPD

No	PD/UKPD	APBD	Pergeseran II	APBD-P
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	188.165.219.861	188.398.816.140	183.230.388.135
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	25.158.611.718	25.158.611.718	26.203.368.766
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	20.721.474.629	20.721.474.629	21.457.305.497
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	27.821.055.939	27.821.055.939	28.334.210.133
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	27.381.646.014	27.381.646.014	28.119.803.350
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	33.738.062.318	33.738.062.318	34.328.833.206
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	4.950.707.460	4.950.707.460	4.895.670.637
8	Unit Pengelola Metrologi	7.707.190.929	7.707.190.929	7.631.662.646
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4.662.945.803	4.429.150.907	4.417.862.199
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	12.894.993.064	12.894.993.064	13.803.047.625
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	6.418.505.049	6.418.505.049	6.406.859.303
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.827.647.018	7.827.647.018	7.616.019.221
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.765.470.288	3.765.470.288	3.159.921.292
	TOTAL	371.213.530.090	371.213.331.473	369.604.952.010



Tabel 2. 8 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	APBD	Pergeseran II	APBDP
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan		65.597.605.224	65.597.605.224	66.707.296.217
	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	65.597.605.224	65.597.605.224	66.707.296.217
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan		44.027.007.921	44.027.007.921	55.276.957.615
	persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	44.027.007.921	44.027.007.921	55.276.957.615
Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi		261.588.916.945	261.588.718.328	247.620.698.178
	Jumlah koperasi yang berkualitas	1.662.128.144	1.410.323.253	997.765.031
	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	259.926.788.801	260.178.395.075	246.622.933.147
	TOTAL	371.213.530.090	371.213.331.473	369.604.952.010

Tabel 2. 9 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Program

Kode	Program	APBD	Pergeseran II	APBDP
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	194.553.423.971	194.553.423.971	181.050.903.519
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7.800.000	7.800.000	7.800.000
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.000.250.643	748.445.752	748.445.752
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	654.077.501	654.077.501	241.519.279
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	65.139.768.551	65.391.374.825	65.338.433.349
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	233.596.279	233.596.279	233.596.279
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	254.161.378	254.161.378	254.161.378
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	6.115.532.175	6.115.532.175	6.485.224.350
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	7.871.097.189	7.871.097.189	7.762.410.578
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29.786.217.179	29.786.217.179	40.775.161.309
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	65.587.797.475	65.587.797.475	66.697.488.468
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	9.807.749	9.807.749	9.807.749
	Total	371.213.530.090	371.213.331.473	369.604.952.010



Tabel 2. 10 Pagu Belanja Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	APBD	Pergeseran II	APBDP
5.1.01	Belanja Pegawai	143.249.306.633	143.249.306.633	131.917.143.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.898.924.250	217.898.725.633	223.603.296.778
5.1.05	Belanja Hibah	3.029.180.543	3.029.180.543	3.029.180.543
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.682.144.584	5.682.144.584	9.057.612.219
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.353.974.080	1.353.974.080	1.997.718.870
	Total	371.213.530.090	371.213.331.473	369.604.952.010

2.3.3 Aktivitas Prioritas mendukung Sasaran Strategis

Aktivitas-aktivitas yang teranggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta perubahannya, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas prioritas dan unggulan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sasaran Strategis Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan, didukung oleh beberapa aktivitas yang telah teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten Administrasi selama Tahun 2024. Aktivitas yang mendukung sasaran strategis tersebut di antaranya Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (WUIB), Pendampingan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berkualitas dan Pelaksanaan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan didukung oleh beberapa aktivitas yang telah teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten Administrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun 2024. Aktivitas yang mendukung Sasaran Strategis tersebut di antaranya Penyelenggaraan Pasar Murah, Kurasi dan partisipasi pameran produk dan bazar, pemberdayaan kelembagaan Perlindungan konsumen, pengawasan perdagangan dan metrologi legal dan pelayanan pengujian serta metrologi legal.

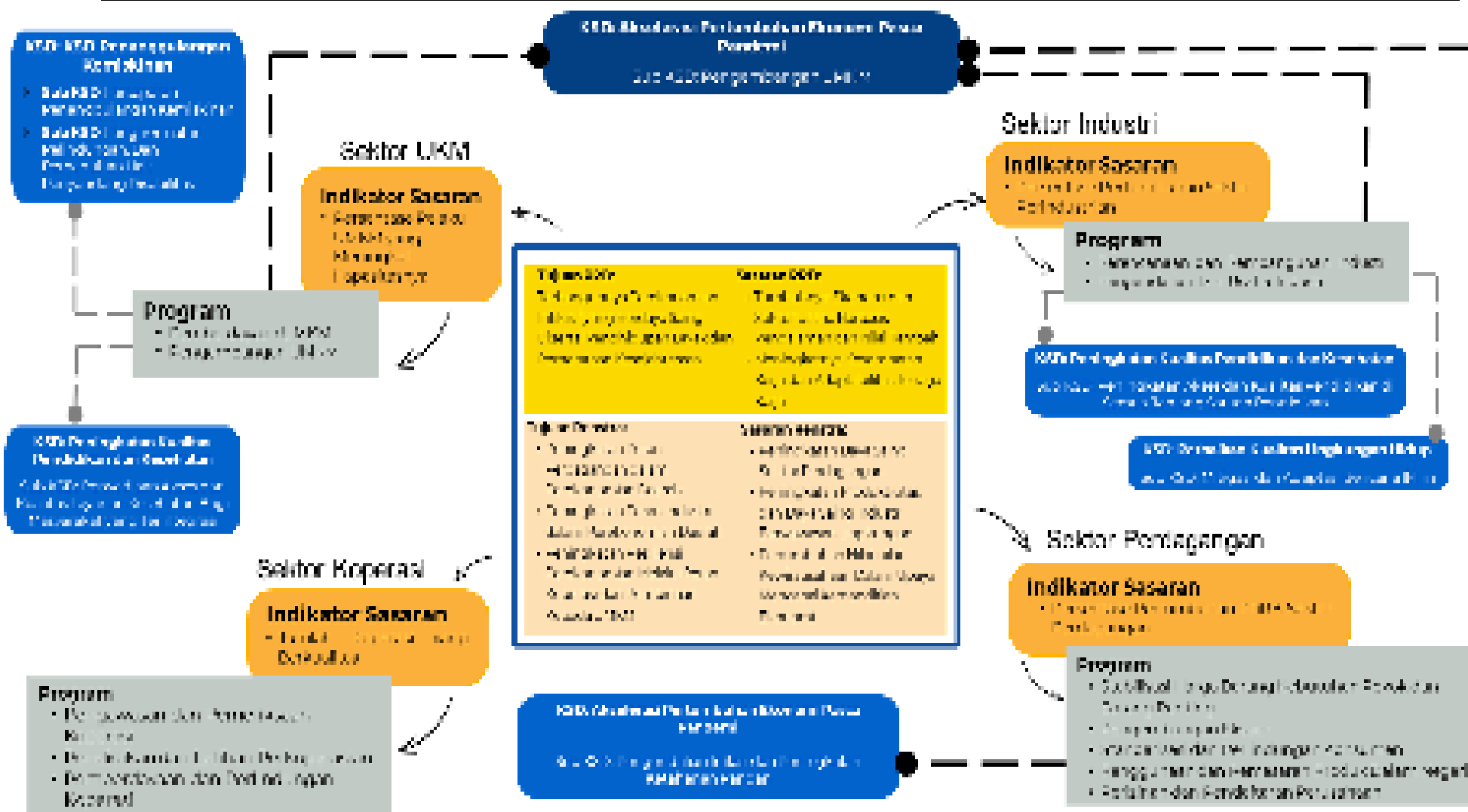
Sasaran Strategis Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi didukung oleh beberapa aktivitas yang telah teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten



Administrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun 2024. Aktivitas yang mendukung Sasaran Strategis tersebut di antaranya Fasilitas Akta Pendirian Koperasi, Bimbingan Teknis terkait pemberdayaan dan kelembagaan koperasi, Pemeriksaan Kesehatan koperasi, Pembinaan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Penataan Sarana dan Prasarana PKL, Penyelenggaraan Jakarta International Trade Expo (JITEX).

2.4 CROSS-CUTTING KINERJA

Rencana Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah memiliki beberapa irisan dengan lingkup Rencana Kinerja Strategis lain di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun yang beririsan dengan lingkup Rencana Kinerja Strategis Teknis lainnya di Internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada lingkup Rencana Kinerja Strategis Lainnya. Pada Lingkup Rencana Kinerja Strategis Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rencana Kerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beririsan dengan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada Lingkup Rencana Kinerja Strategis Teknis Lainnya di Internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Rencana Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beririsan dengan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).



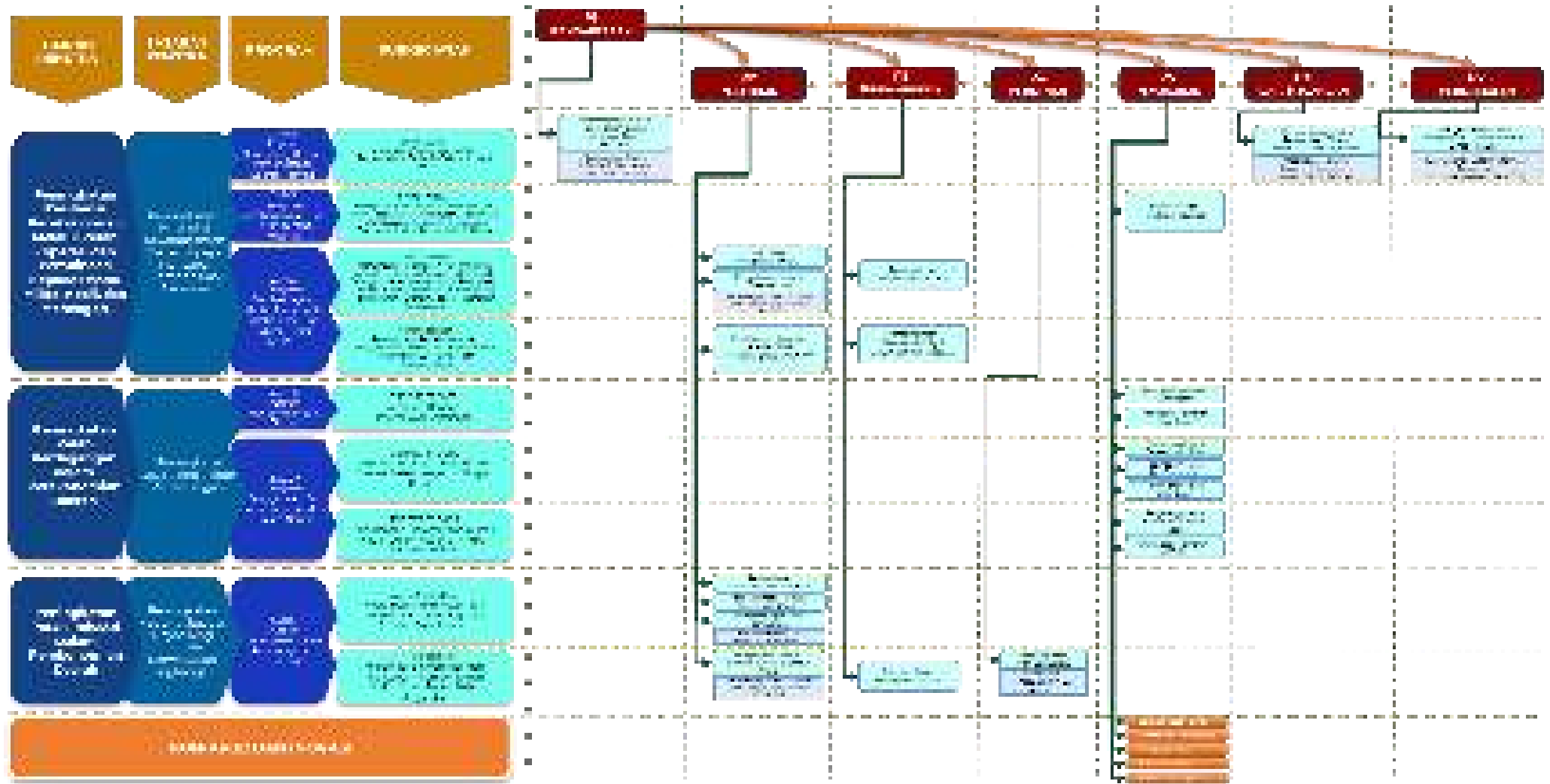
Gambar 2. 4 Crosscutting Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Kegiatan Strategis Daerah

Rencana kinerja strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki irisan kinerja dengan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas. Sebagai pengampu utama KSD



Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi, pada sub-KSD Pengembangan UMKM, seluruh tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pencapaian Rencana Aksi KSD tersebut, walaupun hanya 3 dari 4 indikator sasaran strategis yang mendukung secara langsung, yaitu di Indikator Sasaran Strategis di Sektor Industri, Sektor Perdagangan, dan Sektor UKM. Indikator Sasaran Strategis di Sektor UKM, beririsan kinerja dan mendukung pencapaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan pada Sub KSD percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Sub KSD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada Sub-KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi. Indikator Sasaran Strategis di Sektor Perindustrian beririsan kinerja dan mendukung pencapaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada Sub KSD Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Semua Jenjang Satuan Pendidikan dan KSD perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup pada Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim. Indikator Sasaran Strategis di Sektor Perdagangan beririsan kinerja dan mendukung pencapaian Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi pada Sub KSD Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan.

Selain irisan kinerja antara Rencana Aksi KSD dengan Rencana Kinerja Strategis Perangkat Daerah, secara internal juga terdapat irisan kinerja antara Rencana Kinerja Strategis Perangkat Daerah dengan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik di bawah. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dari 7 (tujuh) fase, yaitu P1 pendaftaran, P2 Pelatihan, P3 Pendampingan, P4 Perizinan, P5 Pemasaran, P6 Pelaporan Keuangan dan P7 Fasilitasi Permodalan. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beririsan kinerja dengan 6 (enam) Program PKT, yaitu P1 Pendaftaran, P2 Pelatihan, P3 Pendampingan, P5 Pemasaran, P6 pelaporan Keuangan, dan P7 Fasilitasi permodalan. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Urusan Perdagangan beririsan kinerja dengan 1 (satu) Program PKT, yaitu P5 Pemasaran. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Urusan Perindustrian beririsan kinerja dengan 3 (tiga) Program PKT, yaitu P2 Pelatihan, P3 Pendampingan dan P4 Perizinan.



Gambar 2. 5 Crosscutting Kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Pengembangan Kewirausahaan Terpadu



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Kelaziman dalam disiplin perencanaan, toleransi penyimpangan (maksimal) antara perencanaan vs pelaksanaan berkisar antara +/- 10 (sepuluh) persen. Toleransi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi : perubahan-perubahan lingkungan strategis/situasi dan kondisi lapangan yang terjadi selama jeda perencanaan sampai pelaksanaan, seperti perubahan-perubahan pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan (misalkan: kenaikan atau perubahan harga-harga yang digunakan dalam asumsi perencanaan, pergeseran-pergeseran prioritas dan lain sebagainya).

Penggolongan status kinerja realisasi di atas, dimaksudkan untuk memberikan indikasi dan informasi keberhasilan organisasi dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk memberikan indikasi kualitas proses organisasi dan kemampuan (kapabilitas)

organisasi dalam mewujudkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan. Ini semua dengan asumsi kualitas perencanaan yang diselenggarakan cukup baik, dalam artian cermat, logis dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable).

Semakin besar skala suatu organisasi dan semakin kompleks proses organisasi yang diselenggarakan, maka semakin besar (relatif) kisaran toleransi status kinerja realisasi yang tidak dapat diterima (unacceptable). Sebaliknya, semakin kecil skala suatu organisasi, dan semakin sederhana proses organisasi yang diselenggarakannya, maka umumnya semakin ketat (relatif) kisaran toleransi status kinerja realisasi yang tidak dapat diterima.

Hal ini tidak berlaku bagi organisasi yang telah mapan dan telah memiliki pengendalian proses organisasi yang prima, serta tidak dapat menerima penyimpangan atau menerapkan prinsip “tidak ada toleransi” (zero tolerance atau error free). Organisasi semacam tersebut, meskipun memiliki skala organisasi yang relatif besar dan memiliki proses organisasi yang kompleks, akan menerapkan penetapan status kinerja realisasi yang sangat ketat dengan toleransi dalam kisaran yang sempit.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yang tersaji dalam tabel berikut. Untuk capaian kinerja di atas 110%, dikonversi menjadi maksimal 110% agar dapat terhitung secara rata-rata yang lebih terjustifikasi.

Tabel 3. 1 Kriteria interpretasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat tinggi
2.	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3.	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4.	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5.	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



3.2 CAPAIAN RENCANA KINERJA STRATEGIS TAHUN 2024

3.2.1 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Data realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 diambil dari data capaian di sistem E-monev yang tersaji dalam tabel berikut. Dalam perhitungan rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Capaian indikator kinerja di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%.

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN STRATEGIS						
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	%	12,4	N/A	N/A
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	17	N/A	N/A
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	7,35	7,75	105,44%
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	50	100%
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	%	89	89	100%
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	7	N/A	N/A
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,7	N/A	N/A
SASARAN KHUSUS						
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	%	100	100	100%
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	Nilai	3,25	100	30.769%
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	%	100	100	100%
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	%	80	99,4	124,2%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2. Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	%	100	100	100%
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	%	100	100	100%
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	%	100	100	100%
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	%	100	100	100%
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	%	71	93,46	131,63%
SASARAN OPERASIONAL						
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100%
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	100	100	100%
RATA-RATA						102,4%
KRITERIA						Sangat Tinggi

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mampu 17 sasaran dengan 19 indikator kinerja. Dari 17 sasaran tersebut terbagi menjadi 3 kelompok sasaran, yaitu Sasaran Strategis yang terdiri dari 6 sasaran dengan 7 indikator kinerja, Sasaran Khusus yang terdiri dari 8 sasaran dengan 9 indikator kinerja dan Sasaran Operasional yang terdiri dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja.
2. Dari 19 indikator kinerja pada 17 sasaran tersebut, 15 indikator kinerja di antaranya memiliki realisasi dan capaian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024. Sedangkan 4 indikator pada 4 sasaran strategis, tidak memiliki realisasi dan capaian. Hal ini diakibatkan data PDRB Provinsi DKI Jakarta yang belum rilis sampai dengan laporan ini di sampaikan.
3. Dari perhitungan 15 indikator kinerja yang memiliki realisasi, seluruh indikator kinerja tersebut telah tercapai di atas atau sama dengan 100%.



4. Dengan asumsi seluruh indikator memiliki bobot indikator kinerja yang sama dan menapisikan data yang belum rilis, maka rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 memiliki capaian hingga 102,4%.
5. Dengan nilai tersebut, maka pengukuran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 memiliki kategori capaian kinerja Sangat Tinggi
6. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tersebut, Sasaran Perjanjian Kinerja yang diampu berhasil tercapai dan memiliki dampak (impact) dengan analisis sebagai berikut:
 - a. Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan secara historis dan harapan (outlook) merupakan sektor terkemuka (leading sector) pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Pertumbuhan Ekonomi Sektoral pada kedua sektor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan Ekonomi sektoral tersebut menunjukkan nilai yang positif dan selalu berkontribusi signifikan tiap tahunnya sehingga kedua nilai PDRB sektoral tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu pula pada kontribusi PDRB sektoral tersebut juga meningkatkan dominansi sektor Perindustrian dan Perdagangan di DKI Jakarta. Dengan begitu, indikator yang terkait Pertumbuhan Sektoral dan Kontribusi Sektoral dari Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan secara signifikan telah mendukung Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tumbuhnya ekonomi dan Sektor Usaha berbasis Pengalaman dan Nilai Usaha. Keempat Sasaran strategis tersebut (Sasaran Nomor 1, Nomor 2, Nomor 5 dan dan Nomor 6) memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sektor lain di Provinsi DKI Jakarta
 - b. Pertumbuhan pelaku UMKM dan peningkatan kapasitas UMKM memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak secara luas dalam meningkatkan perekonomian sesuai dengan tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian. UMKM merupakan sektor yang resilien dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, untuk itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu berusaha meningkatkan jumlah pelaku UMKM secara kuantitatif dan meningkatkan kapasitas UMKM secara kualitatif yang mampu meningkatkan dan menggerakkan perekonomian. Lebih lanjut, Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Pertumbuhan UMKM secara

kuantitatif dan kualitatif sebagai salah satu entitas penggerak ekonomi yang dipadukan dengan koperasi yang berkualitas dari sisi legalitas usaha dan peningkatan omzet usaha yang menjadi sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Nomor 3 dan Nomor 4) dapat meningkatkan perekonomian dan diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta

- c. Walaupun hampir seluruh Sasaran Khusus bukan kewenangan inti dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (kecuali pada Sasaran Khusus “Peningkatan penggunaan produk dalam negeri”) namun Sasaran Khusus juga berperan dalam mendukung fungsi administratif dan pemerintahan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dari sisi pengelolaan data dan informasi (Nomor 7 dan Nomor 8), kedua sasaran tersebut memastikan kualitas data dan penyampaian informasi yang dilakukan perangkat daerah sesuai dengan asas yang ada serta mendukung keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Melalui pengelolaan aset, keuangan, dan kinerja beserta risikonya (Nomor 9, Nomor 10, Nomor 13 dan Nomor 14) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas aset dan keuangan disertai mitigasi risiko yang mumpuni terhadap hambatan pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pengelolaan atas aset, keuangan dan risiko tersebut dapat berdampak pada peningkatan capaian dan peningkatan kemungkinan keberhasilan pencapaian target yang terdapat pada Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Nomor 11 dan Nomor 12), melalui peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegawai, berdampak pada peningkatan kualitas pegawai dimana pegawai yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Sasaran Khusus “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri” merupakan kewenangan inti dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Ketua Harian Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi DKI Jakarta. Perhitungan sasaran ini digunakan untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dengan adanya Program P3DN ini, diharapkan mempunyai efek pengungkit yang besar dan signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional serta dapat menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor lain. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah Nomor e-0001/PI.03.00 tanggal 3 Januari 2025 hal Laporan Verifikasi Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Biro Setda Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV Tahun 2024, disampaikan bahwa capaian persentase Realisasi PDN Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,41% dengan rincian Realisasi Belanja PDN (termasuk pengadaan yang melalui penyedia maupun swakelola) sebesar Rp.33,86 Triliun dan Realisasi Pembayaran (di luar belanja pegawai, belanja modal tanah, pembayaran pinjaman hibah dan bantuan sosial) sebesar Rp. 35,49 Triliun

3.2.2 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Aksi (Renaksi) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengetahui realisasi dan capaian pada triwulan yang bersangkutan dan mendorong percepatan dan peningkatan realisasi Rencana Aksi IKU yang diharapkan dapat mendorong pencapaian IKU Kepala Perangkat Daerah agar dapat tercapai sesuai dengan target.

Tabel 3. 3 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC	Realisasi
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	12.4	RA 1. Pemantauan Industri Prioritas Kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	KK. 1.1 Tersusunnya laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	T/01.1.1 Pelaksanaan FGD Profil Industri Prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan BPS	Tw.1	Kepala Bidang Perindustrian	Data Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Berita Resmi Statistik) belum dipublikasikan oleh BPS. Publikasi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta triwulan IV Tahun 2024, diperkirakan rilis di bulan Februari Tahun 2025. Screenshot website BPS terlampir
						T/01.1.2 Dokumen laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perindustrian	sudah dilaksanakan pada saat BM, laporan berupa BA dan nota dinas ke kepala dinas PPKUKM
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	17	RA 1. Keterjangkauan Harga	KK1.1. Terlaksananya Pasar atau Bazar Murah Menjelang HBKN	T/O1.1.1. Pelaksanaan Pasar Murah di 7 lokasi	Tw 2	Kepala Bidang Perdagangan	Melaksanakan Pasar Murah dan BULOG Jual Langsung (BULOG Siaga) dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan barang pokok di Provinsi DKI Jakarta menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan



NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC	Realisasi
									total terselenggara di 246 lokasi pada 2 periode yang bekerjasama dengan BULOG, Dharma Jaya dan Rajawali Nusindo dengan total penjualan sebesar Rp 5.269.630.000
						T/O1.1.2. Pelaksanaan Pasar Murah di 6 lokasi	Tw 4	Kepala Bidang Perdagangan	Melaksanakan Pasar Murah pada 7 lokasi di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi pada tanggal 3 s.d 12 Desember 2024. Pasar murah berkolaborasi dengan BULOG, Dharma Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, dan Alfresh Gedong dengan total penjualan mencapai Rp 344.947.500
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	7.35%	RA 1. Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	KK1.1 Terlaksananya keterserapan tamatan SMK melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	T/O1.1.1. Terlaksananya pelatihan dan praktik kewirausahaan	Tw 3	Kepala Bidang Perindustrian	pelatihan dan praktik kewirausahaan yang diikuti oleh 49 peserta dari lulusan SMK dengan materi pelatihan Wirausaha Industri Baru (WUIB) tahun 2024, yaitu: - Kuliner : Membuat Mentai Rice, Membuat Oreo Cheesecake, Membuat Matcha Seasalt, Membuat Mie Gacoan, Membuat Setup Roti Tawar, Membuat Milo Whipped Latte, Membuat Dimsum. - Fesyen : Membuat Vest Brukat dengan Tali dan Tunik/Abaya, Membuat Blouse dan Apron - Kerajinan : Membuat Tote Bag dan Membuat Pouch Lingkar Kerut
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	50	RA1. Penyusunan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	KK1.1. Tersusunnya Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	T/O1.1.1. Surat Edaran Kepala Dinas Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	TW 1	Kepala Bidang Koperasi	Telah dibuat Surat Edaran Nomor e-0009/SE/2024 tentang Kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi tahun buku 2024
				RA2. Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	KK2.1. Terlaksananya Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	T/O2.1.1. Pelaksanaan FGD dan sosialisasi koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	TW 2	Kepala Bidang Koperasi	Kegiatan transformasi digital menuju koperasi modern sudah dilakukan pada Business Matching ke-12 dengan mengundang 100 koperasi sekolah



NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC	Realisasi
				RA3. Temu Mitra Koperasi dengan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	KK3.1. Terlaksananya temu mitra koperasi dengan stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	T/O3.1.1. Pelaksanaan Temu Mitra koperasi dengan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	TW 3	Kepala Bidang Koperasi	1.telah dilakukan FGD Strategi Peningkatan Kapasitas Koperasi dalam mendukung Jakarta sebagai Kota global yang berdaya saing dalam rangkaian JITEX pada Tanggal 10 Agustus 2024 2.telah dilakukan FGD pada kegiatan Business Matching ke-16 berlokasi di Waliktoa Jakarta Barat pada tanggal 10 September 2024 3.telah dilaksanakan kegiatan diskusi implementasi Permenkop 8 Tahun 2023, peran koperasi di sekolah, pemasaran produk koperasi, peluang kolaborasi
				RA4. Optimalisasi Inventarisasi Data Koperasi yang berkualitas	KK4.1.Tersedianya Data Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	T/O4.1.1. Pelaksanaan Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	TW 4	Kepala Bidang Koperasi	Jumlah koperasi berkualitas sebanyak 25 koperasi
	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	89%	RA 1. Pembinaan dan Pengembangan UMKM	KK1.1. Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	Tw 2, 3	Kepala Bidang UKM	Kepala Bidang UKM	Telah melaksanakan kegiatan Literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur yang berkolaborasi dengan OJK, PT PNM, PT Pegadaian dan PT Jamkrida. Kegiatan diikuti oleh 500 peserta offline dan 570 peserta online
									update katalog UMKM dalam e-order sebanyak 125 produk dari UMKM baru atau yang eksisting dan telah dikurasi, serta melakukan kurasi produk makan dan minum e-order sebanyak 40 UMKM
				KK1.2. Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	T/O1.2.1. Update katalog e-order (25 - 50 - 50)	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan	Kepala Bidang Perdagangan	pemerataan transaksi e-order dengan penarikan data transaksi per bulan desember dimana telah terdapat 60 UMKM dengan total 416 kali transaksi dan omset sebanyak Rp 1.394.308.310
				KK1.3. Terlaksananya pemerataan pemesanan binaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order	T/O1.3.1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM	Tw 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan		



NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC	Realisasi
					KK1.4 Terfasilitasinya UMKM unggulan pada Kegiatan UMKM Expo	T/O1.4.1 Pelaksanaan Kegiatan UMKM Expo	Tw 3	Kepala Bidang UKM	Telah dilaksanakan pada 7 -11 Agustus 2024 bertempat di JCC
				RA 2. Peningkatan UMKM naik kelas	KK2.1. UMKM yang naik kelas	T/O2.1.1. Jumlah UMKM yang naik kelas (mengalami kenaikan omzet) (5400 UMKM)	Tw 4	Kepala Bidang UKM	capaian jumlah UMKM berdasarkan tarikan data QRIS dan e-order sebesar 5.430 UMKM mengalami kenaikan omzet dimana tahun 2024 lebih besar dari omzet 2023
					KK2.2. Pengembangan dashboard naik kelas	T/O2.2.1 Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukan invoice dengan nilai $\geq$ USD 200)	Tw 1, 2, 3, 4	Kepala Bidang Perdagangan	Telah dilakukan inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor dengan minimal nilai invoice diatas \$200. Dimana sudah terdapat 22 UMKM binaan yang telah melakukan ekspor dengan total nilai ekspor USD 85.797
						T/O2.2.2 Pengembangan dashboard ekspor di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM)	Tw 2	Kepala Pusdatin	telah melakukan pengembangan dashboard ekspor di sistem jakarta entrepreneur
						T/O2.2.3 Pengembangan dashboard omzet (qris dan eorder) di sistem jakarta entrepreneur (DPPKUKM)	Tw 2	Kepala Pusdatin	telah melakukan pengembangan dashboard omzet (transaksi qris dan integrasi eorder) di sistem jakarta entrepreneur
					KK2.3. Peningkatan jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sesuai dengan target	T/O2.3.1 Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp437.540.538	Tw 1	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab	Sudah terealisasi omzet sebanyak Rp.4.216.268.608 atau tercapai 963%
						T/O2.3.2 Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem	Tw 2	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab	Sudah terealisasi omzet sebanyak Rp.5.464.144.010 pada Triwulan II dan secara akumulasi telah tercapai sebanyak Rp.9.680.412.618 atau tercapai 130,14%



NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu	PIC	Realisasi
						Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607			
						T/O2.3.3 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607	Tw 3	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab	Sudah tercapai jumlah omset Sudah terealisasi omset sebanyak Rp.8.569.234.473 pada Triwulan III dan secara akumulasi telah tercapai sebanyak Rp.18.249.647.091 atau tercapai 126,39%
						T/O2.3.4 Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp3.062.783.765	Tw 4	1. Kepala Bidang UKM 2. Kepala Suku Dinas 6 Wil Kota/Kab	Sudah tercapai jumlah omset Sudah terealisasi omset sebanyak Rp.9.460.757.322 pada Triwulan IV dan secara akumulasi telah tercapai sebanyak Rp.27.710.404.413 atau tercapai 158,33%
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	7	RA 1. Pendampingan Penyampaian Laporan Industri melalui SIINas	KK1.1. Terlaksananya pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas	T/O1.1.1 Laporan pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas	Tw 1, 3	Bidang Perindustrian	Sudah dilakukan di bulan Agustus
				RA 2. Pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta	KK2.1. Terlaksananya pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	T/O2.1.1 Laporan pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	Tw 1, 2, 3, 4	Bidang Perindustrian	Sudah dilakukan di bulan Agustus
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5.7	RA 1. Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan	KK1.1 Terlaksananya Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan	T/O1.1.1 Laporan perizinan usaha yang diterbitkan pada sektor perdagangan	Tw 2, 4	Kepala Bidang Perdagangan	telah diveifikasi: SPKL B-C 2.255 SKP B-C 261 TDG 748 Total data verifikasi perizinan melalui sistem OSS-RBA adalah 3.264 perizinan
				RA 2. Pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	KK2.1. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	T/O2.1.1 Laporan pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	Tw 2, 4	Kepala Bidang Perdagangan	Telah mendampingi 48 pelaku usaha



Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Renaksi IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada 6 Sasaran Strategis, telah dijabarkan ke dalam 13 Rencana Aksi, 18 Kriteria Keberhasilan, dan 25 target output yang berfungsi sebagai output antara dengan IKU yang diampu oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Walaupun realisasi dari Renaksi tersebut hanya disampaikan secara naratif dan belum diukur secara kuantitatif serta belum menjadi salah satu acuan dalam perhitungan kinerja individu, namun Renaksi tersebut telah dimonitoring tiap triwulanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh target dari Renaksi IKU tersebut telah terealisasi dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.3 Capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu 11 Sub-KSD yang terangkum dalam 6 KSD. Dari 11 Sub-KSD tersebut terdiri dari 19 Rencana Aksi (Renaksi) yang dijabarkan dalam 51 target triwulanan.

Tabel 3. 4 Narasi Realisasi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 sesuai kewenangan

No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN	NARASI REALISASI
1	KSD Penanggulangan Banjir dan Rob		
	Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100%	- Tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan survey dengan BPAD dan Dinas SDA ditemukan bahwa 60 kios kontainer dimana 25 rusak ringan (bisa digunakan) dan 35 rusak berat (tidak bisa digunakan) - Tanggal 21 Desember 2023 BPAD menyampaikan BAST hasil survey kios dengan total 60 kontainer, namun hal ini tidak sesuai dengan hasil survey dimana hanya 25 kios yang bisa digunakan - Tanggal 18 Januari 2024 Dinas PPKUKM menyampaikan surat permohonan perubahan pencatatan dari 60 kios menjadi 25 kios. Hingga capaian KSD dilaporkan belum ada tindak lanjut terkait perubahan jumlah kios
2	KSD Penanggulangan Kemiskinan		
	Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	- Telah melaporkan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dimana progresnya seluruh sub kegiatan/rencana aksi penunjang telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100%



No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN	NARASI REALISASI
	Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	- Melaporkan hasil koordinasi pelatihan binaan jakpreneur dengan seluruh Perangkat Daerah pengampu Jakpreneur - Tercapainya data bantuan 10% UMKM Disabilitas binaan Jakpreneur yang mendapatkan akses permodalan dengan capaian total jumlah UMKM disabilitas binaan Jakarta Entrepreneur mencapai 79 orang dimana 60 orang (75,95%) sudah mendapatkan bantuan akses permodalan - Telah dilaksanakan pelatihan koperasi dengan tema "Dasar-dasar perkoperasian "Manfaat Berkoperasi dan Memahami aturannya, Hidup Lebih Sejahtera" pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan narasumber Karsimin, SE, MM dari Dosen STIE Manajemen Bisnis Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan dimana diikuti oleh 58 peserta dimana 7 diantaranya adalah peserta penyandang disabilitas - Telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan dengan tema "Pengelolaan Keuangan bagi UKM "Atur Keuangan Usahamu" pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan narasumber Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul dan penulis buku "Atur Duitmu" dimana diikuti oleh 60 peserta dimana 8 diantaranya adalah peserta penyandang disabilitas. - Membuat draf kebijakan konsesi retribusi penggunaan tempat usaha bagi penyandang disabilitas pada lokasi binaan dan lokasi sementara - Telah menginventarisir data UMKM Penyandang Disabilitas Anggota Jakpreneur yang mendapatkan akses kios pada Lokasi Binaan, Berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 9 anggota Jakpreneur penyandang disabilitas yang bersedia untuk ketahap lebih lanjut untuk mendapatkan fasilitasi akses kios lokasi binaan dengan usulan kios sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) yang terdiri dari kios dan loss. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan kunjungan oleh Kepala Dinas PPKUKM kepada penyandang disabilitas melalui surat undangan
3	KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional		
	Sub KSD Transformasi Digital	100%	- Telah mengembangkan fungsi pada sistem pembinaan kewirausahaan yaitu: a) Pengembangan dashboard ekspor di sistem jakarta entrepreneur b) Pengembangan dashboard omzet (yang transaksinya diambil dari transaksi qris dan integrasi eorder) di sistem jakarta entrepreneur - Telah melaporkan dokumen manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Sekretaris Daerah dengan nomor 965/KI.00 pada tanggal 17 Desember 2024
	Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	- Telah menyusun dokumen rancangan final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) dimana saat ini dokumen sedang di BKD dalam tahap penandatanganan oleh Bapak PJ Gubernur - Telah menyusun dokumen rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan menyusun Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024 - Telah melaporkan Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 kepada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta



No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN	NARASI REALISASI
			- Telah menyusun dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023 – TW III Tahun 2024 dan dokumen Perangkat Daerah Semester I-II Tahun 2024 - Menyusun Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 - Menyusun dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dan telah mengunggah dokumen LKIP di website esr.mempan.go.id
	Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	- Telah melaporkan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022, dimana analisis jenis pekerjaan masih sama dengan tahun sebelumnya - Telah melaksanakan tindaklanjut LHP periode tahun 2019 s.d. 2024 dengan capaian 100%
4	KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi		
	Sub KSD Pengembangan UMKM	100%	- Telah melaksanakan kegiatan Literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur yang berkolaborasi dengan OJK, PT PNM, PT Pegadaian dan PT Jamkrida. Kegiatan diikuti oleh 500 peserta offline dan 570 peserta online - Telah dilakukan update katalog UMKM dalam e-order sebanyak 125 produk dari UMKM baru atau yang eksisting dan telah dikurasi, serta melakukan kurasi produk makan dan minum e-order sebanyak 40 UMKM - Telah dilaksanakan pemerataan transaksi e-order dengan penarikan data transaksi per bulan desember dimana telah terdapat 60 UMKM dengan total 416 kali transaksi dan omset sebanyak Rp 1.394.308.310 - Telah dilaksanakan penataan sarana dan prasarana PKL (Beautifikasi) pada 22 Lokasi Sementara pada 6 (enam) Wilayah Administrasi dengan rincian : 1. Sudin PPKUKM Jakarta Pusat (Loksem JP 44, JP 10, JP 42, Lokprom Citiwalk) 2. Sudin PPKUKM Jakarta Utara (Loksem JU 07, JU 40, JU 43) 3. Sudin PPKUKM Jakarta Barat (Loksem JB 23, JB 38, JB 32, JB 21, JB 51) 4. Sudin PPKUKM Jakarta Selatan (Loksem JS 09, JS 05, JS 06, JS 08, JS 96) 5. Sudin PPKUKM Jakarta Timur (Loksem JT 05, JT 09, JT 23, JT 35) 6. Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu (Loksem KS 02) - Telah melaporkan capaian jumlah UMKM binaan Dinas PPKUKM yang telah naik kelas berdasarkan tarikan data QRIS dan e-order dengan capaian sebesar 5.430 UMKM mengalami kenaikan omset tahun 2024 lebih besar dari omset 2023 - Telah dilakukan inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor dengan minimal nilai invoice diatas \$200. Dimana sudah terdapat 22 UMKM binaan yang telah melakukan ekspor dengan total nilai ekspor USD 85.797
	Sub KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan	100%	- Telah dilaksanakan Pasar Murah dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan barang pokok di Provinsi DKI Jakarta menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan total terselenggara pada 253 lokasi di 5 wilayah kota administrasi yang bekerjasama dengan BULOG, Dharma Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, Rajawali Nusindo, dan Alfresh Gedong dengan total penjualan sebesar Rp 5.614.577.500
5	KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan		



No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN	NARASI REALISASI
	Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi	100%	- Telah melaksanakan implementasi kantin sehat di lokasi usaha mikro binaan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dimana terdapat 10 lokasi kantin sehat yang sudah dilakukan implementasi dan penilaian akhir, yaitu: 1. Kantin Kantor Walikota Jakarta Pusat 2. Lokasi Promosi City Walk 3. Kantin Kantor Dinas PPKUKM 4. Kantin Kantor Walikota Jakarta Utara 5. Kantin Kantor Walikota Jakarta Barat 6. Lokasi Sementara JB03 Puri Kencana 7. Kantin Layang Kementerian PUPR 8. Pujasera JS 09 Nyi Ageng Serang 9. Kantor Kantin Walikota Jakarta Timur 10. Loksem JT 05 Kecamatan Matraman
	Sub KSD Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang Satuan Pendidikan	100%	- Telah melaksanakan pelatihan dan praktik kewirausahaan yang diikuti oleh 49 peserta dari lulusan SMK dengan materi pelatihan Wirausaha Industri Baru (WUIB) tahun 2024, yaitu: a) Kuliner : Membuat Mentai Rice, Membuat Oreo Cheesecake, Membuat Matcha Seasalt, Membuat Mie Gacoan, Membuat Setup Roti Tawar, Membuat Milo Whipped Latte, Membuat Dimsum. b) Fesyen : Membuat Vest Brukat dengan Tali dan Tunik/Abaya, Membuat Blouse dan Apron c) Kerajinan : Membuat Tote Bag dan Membuat Pouch Lingkar Kerut
6	KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup		
	Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	- Telah melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait edukasi dalam mengurangi sampah produksi makanan yang terbuang (food loss) pada 165 orang peserta pada triwulan III dan IV

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 – 2024 sesuai kewenangan

No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	KSD Penanggulangan Banjir dan Rob		
	Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100%	100%
2	KSD Penanggulangan Kemiskinan		
	Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%
	Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	100%
3	KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan		



No	KSD / SUB-KSD	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
	Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	100%	Tidak ada target
4	KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional		
	Sub KSD Transformasi Digital	100%	100%
	Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%
	Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	99%	100%
5	KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi		
	Sub KSD Pengembangan UMKM	100%	100%
	Sub KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan	100%	100%
6	KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan		
	Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi	Tidak ada target	100%
	Sub KSD Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang Satuan Pendidikan	Tidak ada target	100%
7	KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup		
	Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Tidak ada target	100%
RATA-RATA		99,87%	100%
KRITERIA		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi



Gambar 3. 1 Kemajuan Capaian Kinerja Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 tiap Triwulan



Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Sub-KSD yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada Tahun 2023 diampu sebanyak 9 Sub-KSD dan pada Tahun 2024 diampu sebanyak 11 Sub-KSD
2. Pada Tahun 2023, rata-rata capaian Renaksi KSD sebesar 99,87% dengan kriteria sangat tinggi dan pada Tahun 2024, terjadi peningkatan rata-rata capaian Renaksi KSD menjadi sebesar 100% dengan kriteria Sangat Tinggi.
3. Konsistensi capaian Renaksi KSD Tahun 2024 juga turut terjaga di tiap triwulan, mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, yaitu 100%
4. Renaksi KSD sebagai salah satu sarana cross-cutting kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggambarkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada sektor lain

3.3 REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.3.1 Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Program/kegiatan/Subkegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan secara komprehensif melalui Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2024, serta Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulanan Tahun 2024. Dalam perhitungan rata-rata capaian kinerja program, Capaian indikator kinerja di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

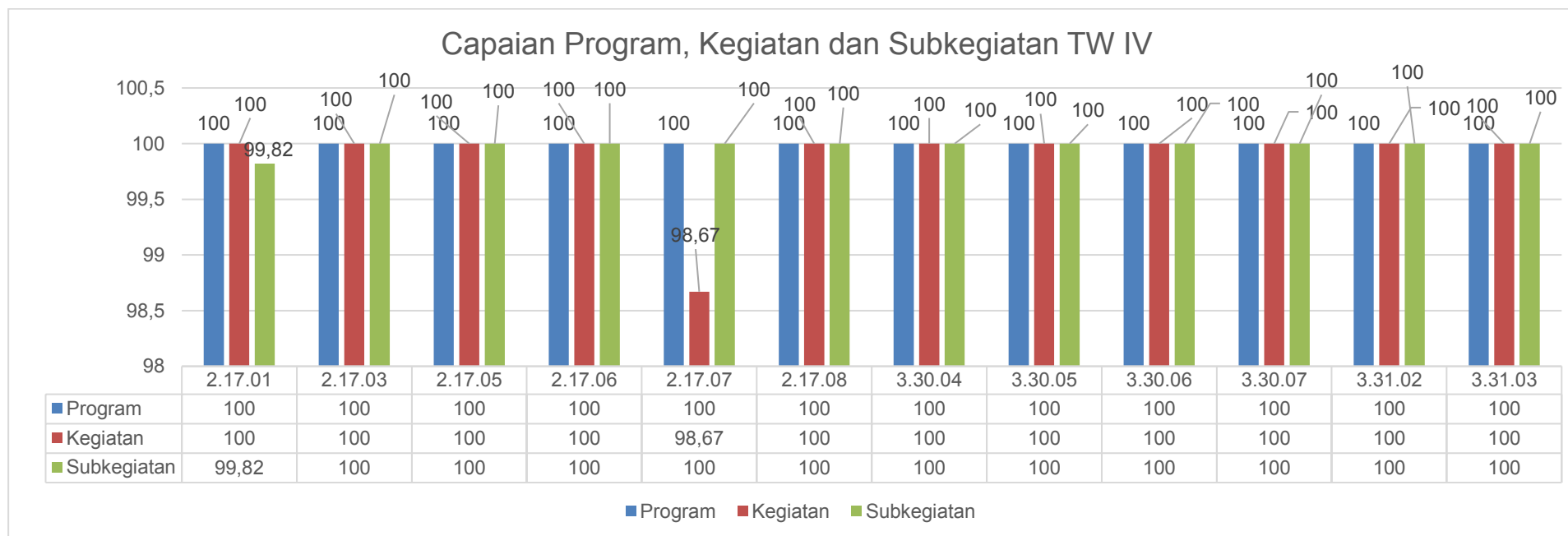
No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Capaian (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	57	60	63	65	57	67,66	-	-	100	112,77	-	-



No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Capaian (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	50	60	65	70	80	65,28	-	-	160	108,80	-	-
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	2	2	2	4,62	4,62	-	-	231	231	-	-
		Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	%	0,47	0,48	0,49	0,50	0,595	0,506	-	-	127	105,42	-	-
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	2,5	3	3,5	4	3,06	3,27	-	-	122	109	-	-
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	%	70	80	90	100	91,2	82,63	-	-	130	103,29	-	-
6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pemanfaatan SKA	%	60	61	62	63	63	69	-	-	105	114,75	-	-
		Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)	%	70	75	80	85	77	84,34	-	-	110	112,45	-	-
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Koefisien	14	14	14	14	14	5,5	-	-	100	160,71	-	-
8	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta (USD)	USD	11.427.794.400	11.542.072.344	11.657.493.067	11.774.067.998	12.085.560.000	12.585.150.000	-	-	106	109,04	-	-
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	%	80	81	82	83	93,32	95,49	-	-	117	117,89	-	-
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	%	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	%	20	30	40	50	56	30	-	-	280	100	-	-
11	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	%	3,5	4	4,5	5	9,5	36,51	-	-	271	912,75	-	-



No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Capaian (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	%	50	55	60	65	83,7	97,1	-	-	167	176,55	-	-
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Tertib Perizinan	%	55	60	65	70	55	60,21	-	-	100	100,35	-	-
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	-	-
RATA-RATA												106,17	106,43		
KRITERIA												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		



Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan IV Tahun 2024 di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu 18 Indikator Kinerja Program yang terdapat pada 13 Program yang terangkum pada 3 (tiga) Urusan Bidang Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, dan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
2. Pada Tabel perhitungan, capaian indikator kinerja program di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%, sedangkan pada grafik capaian kinerja, capaian indikator kinerja di atas 100% dikonversi menjadi 100%
3. Berdasarkan tabel perhitungan capaian indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja telah terealisasi sesuai dan/atau di atas target yang ditetapkan. Jika diasumsikan seluruh capaian indikator kinerja program yang bernilai lebih dari 110% telah dijustifikasi menjadi 110%, maka Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2023 bernilai 106,17% dan pada Tahun 2024 bernilai 106,43% dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan Program yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menunjukkan kinerja yang sesuai harapan.
4. Berdasarkan grafik, terdapat capaian kegiatan dan Subkegiatan yang belum mencapai 100%. Pada tingkat Kegiatan, terdapat kesalahan penginputan dan validasi pada salah satu indikator kegiatan sehingga menyebabkan nilai yang tidak sempurna. Pada Tingkat Subkegiatan, terdapat Subkegiatan yang di luar kendali Perangkat Daerah dalam memperoleh hasil sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

3.3.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Berikut disajikan realisasi anggaran OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024 berdasarkan masing-masing unit dan berdasarkan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Data realisasi anggaran tersebut diambil dari Sistem Informasi Monev Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per Tanggal 31 Desember 2024 yang belum direviu dan belum di audit.



Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan PD/UKPD

No	PD/UKPD	Tahun 2023			Tahun 2024		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	158.180.092.197	149.605.542.214	94,58%	183.230.388.135	173.860.946.035	94,89%
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	31.194.088.241	29.660.240.178	95,08%	26.203.368.766	24.727.863.809	94,37%
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	25.003.217.776	23.677.464.921	94,70%	21.457.305.497	20.315.719.354	94,68%
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	32.311.024.369	30.471.149.200	94,31%	28.334.210.133	26.167.908.058	92,35%
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	36.781.298.416	34.613.984.063	94,11%	28.119.803.350	26.019.010.960	92,53%
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	42.341.300.094	40.271.462.295	95,11%	34.328.833.206	32.349.109.066	94,23%
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	4.695.698.105	4.440.900.786	94,57%	4.895.670.637	4.694.442.023	95,89%
8	Unit Pengelola Metrologi	23.881.949.983	19.845.967.712	83,10%	7.631.662.646	7.362.214.843	96,47%
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.742.555.433	2.631.905.452	95,97%	4.417.862.199	4.308.667.877	97,53%
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	10.011.265.486	9.632.231.982	96,21%	13.803.047.625	9.918.125.164	71,85%
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	8.806.177.904	8.009.771.044	90,96%	6.406.859.303	6.156.712.251	96,10%
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.660.839.874	9.325.166.391	96,53%	7.616.019.221	7.285.423.939	95,66%
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.333.435.633	5.216.008.041	97,80%	3.159.921.292	2.977.726.138	94,23%
	TOTAL	390.942.943.511	367.401.794.279	93,98%	369.604.952.010	346.143.869.517	93,65%



Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
5.1.01	Belanja Pegawai	123.123.195.000	117.068.907.855	95,08%	131.917.143.600	126.581.292.787	95,96%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.836.464.371	237.527.232.158	93,57%	223.603.296.778	206.358.982.615	92,29%
5.1.05	Belanja Hibah	3.215.104.600	2.549.736.855	79,30%	3.029.180.543	2.644.311.289	87,29%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.192.916.016	9.797.900.118	96,12%	9.057.612.219	8.607.276.186	95,03%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.803.324	451.627.293	79,40%	1.997.718.870	1.952.006.640	97,71%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.460.200	6.390.000	98,91%	-	-	-
	TOTAL	390.942.943.511	367.401.794.279	93,98%	369.604.952.010	346.143.869.517	93,65%

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		APBDP	Realisasi	%	APBDP	Realisasi	%
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan		110.538.966.368	102.725.851.024	92,93%	66.707.296.217	62.786.804.681	94,12%
	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	110.538.966.368	102.725.851.024	92,93%	66.707.296.217	62.786.804.681	94,12%
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan		48.389.858.036	46.404.185.419	95,90%	55.276.957.615	50.804.885.433	91,91%
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	48.389.858.036	46.404.185.419	95,90%	55.276.957.615	50.804.885.433	91,91%
Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi		232.159.565.296	218.412.113.931	94,08%	247.620.698.178	232.552.179.403	93,91%
	Jumlah koperasi yang berkualitas	464.423.280	335.288.517	72,19%	997.765.031	936.366.790	93,85%
	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	231.695.142.016	218.076.825.414	94,12%	246.622.933.147	231.615.812.613	93,91%
	TOTAL	390.942.943.511	367.401.794.279	93,98%	369.604.952.010	346.143.869.517	93,65%

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2023-2024

Kode	Program	Tahun 2023			Tahun 2024		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	188.905.756.094	176.105.845.157	93,22%	181.050.903.519	168.993.686.636	93,34%
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	10.800.000	9.000.000	83,33%	7.800.000	7.800.000	100,00%
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	209.312.517	98,80%	748.445.752	735.079.390	98,21%
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	241.776.000	116.976.000	48,38%	241.519.279	193.487.400	80,11%



Kode	Program	Tahun 2023			Tahun 2024		
		APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	42.643.939.733	41.830.624.162	98,09%	65.338.433.349	62.395.498.177	95,50%
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	145.446.189	140.356.095	96,50%	233.596.279	226.627.800	97,02%
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6.324.124.712	6.241.238.500	98,69%	254.161.378	221.154.300	87,01%
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	6.324.124.712	6.241.238.500	98,69%	6.485.224.350	6.125.311.109	94,45%
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	7.869.452.046	7.049.958.998	89,59%	7.762.410.578	7.357.891.202	94,79%
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	34.050.835.089	32.972.631.826	96,83%	40.775.161.309	37.100.528.822	90,99%
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	110.534.654.018	102.721.621.369	92,93%	66.697.488.468	62.777.054.681	94,12%
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.312.350	4.229.655	98,08%	9.807.749	9.750.000	99,41%
	Total	390.942.943.511	367.401.794.279	93,98%	369.604.952.010	346.143.869.517	93,65%

Berdasarkan data tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024, dengan pagu belanja pada APBD Perubahan sebesar Rp.369,6 miliar, telah terealisasi sebesar Rp. 346,14 miliar atau tercapai 93,65%. Walaupun persentase realisasi lebih rendah sedikit dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 93,98%, namun serapan anggaran tersebut tergolong cukup tinggi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu di atas 90%
2. Berdasarkan UKPD, hampir seluruh PD/UKPD di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai serapan di atas 90%, kecuali Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman (UPKPPUKMP) Pulogadung. Unit tersebut merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang sudah otonom, dimana seluruh Belanja unit tersebut telah sepenuhnya menggunakan sumber pendapatan BLUD itu sendiri. Serapan rendah tersebut diakibatkan adanya penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan dan SiLPA yang dimiliki.



3. Berdasarkan jenis belanja, hampir seluruh jenis belanja telah terealisasi di atas 90% bahkan pada belanja modal, khususnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah terealisasi sebesar 97,71%. Namun pada belanja hibah, realisasi masih di bawah 90% akibat menyesuaikan belanja sesuai kebutuhan. Namun target kinerja yang dibiayai melalui hibah, telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan
4. Berdasarkan sasaran strategis, belanja dari masing-masing sasaran strategis telah menunjukkan serapan anggaran yang baik dengan angka serapan di atas 90%
5. Berdasarkan program, terdapat 2 program yang masih memiliki capaian di bawah 90%, yaitu program pemberdayaan dan perlindungan koperasi (serapan sebesar 80,11%) dan program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (serapan sebesar 87,01%). Kedua program tersebut mengalami efisiensi dan menyesuaikan belanja sesuai dengan kebutuhan serta target kinerja yang diharapkan telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

3.4 ANALISIS KEMAJUAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

3.4.1 Kemajuan Pencapaian Perjanjian Kinerja tiap Triwulan

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat target masing-masing sasaran di tiap triwulannya. Berikut disampaikan realiasi dan capaian tiap triwulan dari masing-masing sasaran. Dalam perhitungan rata-rata capaian Sasaran Perjanjian Kinerja, Capaian indikator kinerja di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%.

Tabel 3. 11 Kemajuan Capaian Perjanjian Kinerja Tiap Triwulan di Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	SASARAN STRATEGIS														
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,4	N/A	N/A
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17	N/A	N/A



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	N/A	N/A	N/A	2.5	3.32	132.8	N/A	5,19	N/A	7.35	7,75	105,44%
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	100%	25	25	100%
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	%	N/A	N/A	N/A	20	55,15	275,75%	40	68,1	170,25%	89	89	100%
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	N/A	N/A
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,7	N/A	N/A
SASARAN KHUSUS															
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	%	100	100	100%	100	100	100	100	100	100%	100	100	100%
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.25	100	30.769%
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	%	5	5	100%	25	30,78	123,12%	55	60,15	109,36%	100	100	100%
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	%	N/A	N/A	N/A	30	182,19	607,3%	N/A	N/A	N/A	80	99,4	124,2%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2. Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	100%	100	100	100%
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	%	N/A	N/A	N/A	50	50	100%	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71	93,46	131,63%
SASARAN OPERASIONAL															
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	99,48	99,48%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%
RATA-RATA						99,9%			104%			102,8%			102,4%
KRITERIA						Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi



Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 tiap triwulan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari triwulan ke triwulan di Tahun 2024 telah mencapai kriteria Sangat Tinggi
2. Pada Triwulan I Tahun 2024, rata-rata Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 99,9% dimana terdapat sasaran Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat yang belum tercapai 100%
3. Untuk sasaran kinerja lain yang terdapat pada tiap triwulan Tahun 2024 telah konsisten tercapai sesuai dengan target di tiap triwulannya. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seluruh terjaga tiap triwulannya.

3.4.2 Kemajuan Historis Capaian Perjanjian Kinerja dalam 1 (Satu) Periode Rencana Strategis

Sasaran dan indikator kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perbandingan historis capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disajikan berada dalam 1 (satu) Periode Rencana Strategis yaitu pada lingkup Tahun 2023-2026. Untuk itu, perbandingan yang disajikan merupakan perbandingan historis capaian Perjanjian Kinerja dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Dalam perhitungan rata-rata capaian Sasaran Perjanjian Kinerja, Capaian indikator kinerja di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%.

Tabel 3. 12 Kemajuan Historis Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN STRATEGIS									
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	%	12,3	11,87	96,50%	12,4	N/A	N/A
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,9	17,67	104,56%	17	N/A	N/A
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	4,5	7,35	163,33%	7,35	7,75	105,44%
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	50	100,00%	50	50	100%
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	%	62	89	143.55%	89	89	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	6,5	4,49	69,08%	7	N/A	N/A
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,6	9,49	169,46%	5,7	N/A	N/A
7	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	%	100	99,67	99,67%	n/a	n/a	n/a
8	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
9	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
10	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
11	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
12	Tercapainya perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
13	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
SASARAN KHUSUS									
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100,00%	n/a	n/a	n/a
15	Meningkatnya pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program							
17	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	A (82)	A (89,05)	108,60%	n/a	n/a	n/a
18	Meningkatnya pengelolaan arsip pada perangkat daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
	Terwujudnya tata Kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	%	100	100	100,00%	n/a	n/a	n/a
19	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	Nilai	n/a	n/a	n/a	3,25	100	30.769%
20	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	4.460.900.000.000	5.253.237.180.667	117,76%	n/a	n/a	n/a
21	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	%	100	100	100.00%	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang		n/a	n/a	n/a	100	100	100.00%
22	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	%	80	87,75	109,69%	80	99,4	124,2%
		Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00%	100	100	100%
23	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	%	100	93,42	93,42%	n/a	n/a	n/a
24	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100%
25	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	%	100	100	100,00%	100	100	100%
26	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	%	100	100	100,00%	100	100	100%
27	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	%	71	96,36	135,72%	71	93,46	131,63%
SASARAN OPERASIONAL									



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
28	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
29	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
30	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
RATA-RATA				101.26%			102,4%		
KRITERIA				Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari perbandingan capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah Sasaran dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 dan 2024. Terjadi rasionalisasi jumlah sasaran dan indikator kinerja, yang sebelumnya di Tahun 2023 sebanyak 33 indikator kinerja, menjadi sebanyak 19 indikator kinerja di Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pemadanan, terdapat 16 indikator kinerja yang persis sama di tahun 2023 dan tahun 2024, dan terdapat 2 indikator kinerja yang hampir sama di tahun 2023 dan tahun 2024. 2 indikator yang hampir sama tersebut yaitu (1) terkait inventarisasi BMD (No 21), yang hanya ada perubahan Tahun saja, dari tahun 2023 ke tahun 2024, dan (2) terkait Pengembangan Kompetensi PNS (No 23 & No 24), dimana terdapat peningkatan target dari sebelumnya 20 Jam Pelajaran menjadi 40 Jam Pelajaran per Tahun
3. Sasaran Kinerja terkait KSD tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Tahun 2024 namun tetap menjadi salah satu dasar penentuan perhitungan kinerja Kepala Perangkat Daerah yang berpengaruh ke penghasilan.
4. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak ada penambahan Sasaran kinerja baru, namun hanya terdapat pembaharuan nomenklatur indikator kinerja saja.
5. Pada Tahun 2023, walaupun terdapat sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai target, namun secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja mencapai 101,26% atau dengan kriteria sangat tinggi.
6. Pada Tahun 2024, terdapat 4 sasaran kinerja yang belum rilis sehingga masih belum dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja.



7. Dibandingkan dengan Tahun 2023, target Tahun 2024 telah menunjukkan penetapan target yang menantang dimana target yang ditetapkan lebih tinggi dari target tahun 2023 dan sama/lebih tinggi dari realisasi Tahun 2023. Lebih lanjut, telah ada efisiensi jumlah sasaran dan indikator yang diampu menyesuaikan dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, baik kewenangan inti teknis maupun administratif strategis.

3.4.3 Kemajuan Harapan (*Outlook*) Capaian Sasaran Strategis

Untuk memproyeksikan ketercapaian realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terhadap kondisi akhir periode rencana strategis, maka dibuat perbandingan kemajuan harapan (*outlook*) capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. pada tabel juga disajikan target indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun berjalan, yaitu Tahun 2024. Dalam perhitungan rata-rata capaian Sasaran Perjanjian Kinerja, Capaian indikator kinerja di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%.

Tabel 3. 13 Kemajuan Harapan (*Outlook*) Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perjanjian Kinerja		Rencana Strategis Tahun berjalan (Tahun 2024)		Rencana Strategis Akhir Periode (Tahun 2026)	
				Tahunan		Kondisi akhir	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
				2023	2024	s.d 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/8	10	11=6/10	12	13=7/12
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	%	11,87	N/A	11,87	12,4	N/A	12,4	N/A	12,6	94,21%
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	17,67	N/A	17,67	17	N/A	17	N/A	17,2	102,73%
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	7,35	7,75	7,75	7,35	105,4%	5	155%	5,5	140,91%
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	50	100	50	100%	50	100%	200	50,00%
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	%	89	89	89	89	100%	60	148,3%	70	127,14%
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4,49	N/A	4,49	7	N/A	7	N/A	8	56,13%
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	9,49	N/A	9,49	5,7	N/A	5,7	N/A	5,9	160,85%
RATA-RATA							101,8%		106,67%		90,4%	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perjanjian Kinerja		Rencana Strategis Tahun berjalan (Tahun 2024)		Rencana Strategis Akhir Periode (Tahun 2026)	
				Tahunan		Kondisi akhir						
				2023	2024	s.d 2024	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/8	10	11=6/10	12	13=7/12
KRITERIA							Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Tinggi	

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan analisis perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis tahun berjalan dan akhir periode adalah sebagai berikut:

1. Dari 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 5 (lima) indikator Sasaran Strategis yang mempunyai target yang sama dengan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 pada Tahun berjalan (Tahun 2024).
2. Pada 2 (dua) indikator Sasaran Strategis lainnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan target yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 pada Tahun berjalan. Kenaikan target tersebut akibat capaian kinerja Tahun 2023 yang telah melampaui target Tahun 2023 dan Tahun 2024. Untuk menjaga keberlanjutan, konsistensi dan target yang lebih menantang (Challenging) dari tahun ke tahun, maka target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja telah disepakati sebesar nilai realisasi Tahun 2023.
3. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap target Renstra Tahunan memiliki capaian lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja. Hal ini akibat ada penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja
4. Rata-rata Capaian kinerja sasaran strategis terhadap target akhir periode renstra masih di angka 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja masih on-the-track dan masuk ada ruang perbaikan untuk mencapai target akhir periode. Untuk sasaran strategis yang sudah melewati target akhir periode renstra, akan terus disesuaikan dengan pada penentuan target Perjanjian Kinerja tahunan.



3.4.4 Kemajuan Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja dengan Standar Nasional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak memiliki Standar Nasional yang harus ditetapkan di tingkat Provinsi dan tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembanding dalam indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Namun terdapat beberapa indikator Sasaran Perjanjian Kinerja yang memiliki realisasi di tingkat nasional yang bisa disandingkan dengan realisasi dan capaian sesuai Perjanjian Kinerja walaupun tidak memiliki target di tingkat nasional.

Tabel 3. 14 Kemajuan Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perjanjian Kinerja			Realisasi Nasional
				Target	Realisasi	Capaian	
SASARAN STRATEGIS							
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	%	12,4	N/A Y on Y TW III: 11,56	N/A	N/A Y on Y TW III: 19,02
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	17	N/A Y on Y TW III: 18,22	N/A	N/A Y on Y TW III: 13,09
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	7,35	7,75	105,44%	
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	50	100%	
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	%	89	89	100%	
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	7	N/A Y on Y TW III: 1,33	N/A	N/A Y on Y TW III: 4,72
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,7	N/A Y on Y TW III: 7.99	N/A	N/A Y on Y TW III: 4.82



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perjanjian Kinerja			Realisasi Nasional
				Target	Realisasi	Capaian	
SASARAN KHUSUS							
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	%	100	100	100%	
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	Nilai	3,25	100	30.769%	
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	%	100	100	100%	
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	%	80	99,4	124,2%	71,41
		2. Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	%	100	100	100%	
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	%	100	100	100%	
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	%	100	100	100%	
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	%	100	100	100%	
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	%	71	93,46	131,63%	
SASARAN OPERASIONAL							
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100%	
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100%	
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	100	100	100%	

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja yang dapat disandingkan dengan realisasi nasional, yaitu (1) Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah, (2) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, (3) Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian, (4) Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan (5) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Walaupun kelima indikator tersebut dapat disandingkan,



namun 4 (empat) indikator pertama di atas tidak dapat dilakukan analisis perbandingan karena data tersebut belum rilis, baik untuk di level nasional maupun di tingkat Provinsi

2. Namun untuk dapat mendapatkan gambaran sementara, telah disajikan realisasi kontribusi dan pertumbuhan PDRB di sektor Perindustrian dan Perdagangan pada Triwulan III Tahun 2024 secara Year-on-Year terhadap Triwulan III Tahun 2023 di tingkat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta.
3. Berdasarkan realisasi kontribusi PDRB Nasional yang dibandingkan dengan realisasi Kontribusi Provinsi DKI Jakarta, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di DKI Jakarta mendominasi dibandingkan dengan kontribusi PDRB Sektor Perindustrian. Hal ini berkebalikan dengan yang terjadi di tingkat nasional dimana kontribusi PDRB Sektor Perindustrian lebih mendominasi. Walaupun kontribusi PDRB Sektor Perindustrian di tingkat Provinsi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, namun Sektor Perindustrian dan Perdagangan masih tetap mendominasi kontribusi PDRB di Provinsi DKI Jakarta.
4. Lebih lanjut terkait Pertumbuhan PDRB sektoral, Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian dan Perdagangan secara nasional lebih landai di angka 4,72% dan 4,82%. Sedangkan pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta memiliki fluktuasi yang berbeda, dimana pada Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian hanya sebesar 1,33% dan pada Sektor Perdagangan sebesar 7,99%
5. Pada lingkup Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Tingkat Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 99,4%, di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terealisasi sebesar 95,41% dan pada Tingkat Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 71,41%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertindak sebagai Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta

3.5 ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DAYA

3.5.1 Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis jumlah kebutuhan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan sesuai dengan Analisis Beban Kinerja (ABK) sebanyak 625 orang. ABK tersebut dapat dipenuhi melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



(PPPK). Berikut disampaikan komposisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 3. 15 Perbandingan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan eksisting

No	UNIT	Pelaksana			Kasatpel			Eselon IV/setara			Eselon III			Eselon II			TOTAL		
		ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	152	57	95	-	-	-	19	18	1	6	5	1	1	1	-	178	81	97
	Sekretariat	35	21	14	-	-	-	4	4	-	1	1	-	1	1	-	41	27	14
	Bidang Perindustrian	17	5	12	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	21	9	12
	Bidang Perdagangan	26	9	17	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	30	13	17
	Bidang Koperasi	15	4	11	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	19	8	11
	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	12	8	4	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	16	12	4
	Bidang Pengawasan	47	10	37	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-	51	12	39
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	17	5	12	8	7	1	4	2	2	1	1	-	-	-	-	30	15	15
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	17	6	11	6	6	-	4	3	1	1	1	-	-	-	-	28	16	12
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	17	7	10	8	8	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	30	20	10
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	17	7	10	10	10	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	32	22	10
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	17	6	11	10	10	-	4	4	-	1	-	1	-	-	-	32	20	12
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	14	4	10	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	18	8	10
8	Unit Pengelola Metrologi	106	41	65	2	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	110	43	67
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7	6	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	11	10	1



No	UNIT	Pelaksana			Kasatpel			Eselon IV/setara			Eselon III			Eselon II			TOTAL		
		ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	16	8	8	2	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	21	12	9
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	53	13	40	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	57	17	40
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	52	11	41	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	56	15	41
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	17	2	15	3	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	22	7	15
TOTAL		502	173	329	55	52	3	49	44	5	18	16	2	1	1	-	625	286	339

Tabel 3. 16 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan

No	UNIT	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	Total
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	5	19	2	39	16	81
	Sekretariat	-	2	10	1	10	4	27
	Bidang Perindustrian	-	-	1	-	4	4	9
	Bidang Perdagangan	-	-	1	-	11	1	13
	Bidang Koperasi	-	-	2	-	2	4	8
	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	-	1	4	1	4	2	12
	Bidang Pengawasan	-	2	1	-	8	1	12
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	-	2	3	-	6	4	15
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	-	2	3	-	8	3	16
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	-	1	2	-	12	5	20
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	-	1	4	-	11	6	22
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	-	-	2	-	13	5	20
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	-	-	3	-	3	2	8
8	Unit Pengelola Metrologi	-	-	11	-	25	7	43
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	-	3	-	5	1	10



No	UNIT	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	Total
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	-	1	2	-	8	1	12
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	-	1	3	-	12	1	17
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	2	4	-	4	5	15
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	1	-	4	2	7
	TOTAL	1	15	60	2	150	58	286

Tabel 3. 17 Komposisi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

KOMPONEN PJLP	Dinas PPKUKM			SDPPKUKM JP			SDPPKUKM JU			SDPPKUKM JB			SDPPKUKM JS			SDPPKUKM JT			SDPPKUKM KS			UP Metrologi			Pusdiklat			UP PKB2T			UP PISP			TOTAL		
	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih	ABK	Eksisting	Selisih			
PETUGAS KEAMANAN	41	22	(19)	35	35	-	27	26	(1)	40	36	(4)	21	21	-	57	55	(2)	-	-	-	-	-	-	6	6	-	6	6	-	21	19	(2)	254	226	(28)
Satpam Kantor	35	18	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	6	6	-	21	19	(2)	68	49	(19)	
Satpam JCH/TKK/Lokbin	6	4	(2)	35	35	-	27	26	(1)	40	36	(4)	21	21	-	57	55	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	177	(9)	
PETUGAS KEBERSIHAN	37	36	(1)	32	28	(4)	24	24	-	40	40	-	25	24	(1)	63	59	(4)	-	-	-	-	-	-	5	3	(2)	5	5	-	17	16	(1)	248	235	(13)
CS Kantor	33	32	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	(2)	5	5	-	17	16	(1)	60	56	(4)	
CS JCH/TKK/Lokbin	4	4	-	32	28	(4)	24	24	-	40	40	-	25	24	(1)	63	59	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	179	(9)	
LABORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	28	(2)	-	-	-	20	20	-	20	18	(2)	70	66	(4)
Laboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	28	(2)	-	-	-	20	20	-	20	18	(2)	70	66	(4)
FRONT OFFICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-
Front Office	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-
TEKNIS M/E	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	7	7	-
M/E Kantor	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2		-	7	7	-
M/E JCH/TKK/Lokbin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENDAMPING	6	6	-	66	63	(3)	50	50	-	66	62	(4)	82	76	(6)	82	76	(6)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	349	(19)
Pendamping IKM	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Pendamping PKT	-	-	-	66	63	(3)	50	50	-	66	62	(4)	82	76	(6)	82	76	(6)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	343	(19)
Grand Total	85	65	(20)	134	127	7)	101	100	(1)	146	138	(8)	128	121	(7)	203	191	(12)	16	16	-	30	28	(2)	12	10	(2)	32	32	-	62	57	(5)	949	885	(64)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, analisis terhadap pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis jumlah kebutuhan ASN terdapat kebutuhan sebanyak 625 jabatan namun hanya 286 jabatan saja yang dapat terpenuhi atau sekitar 45,76% sehingga kebutuhan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan Sumber Daya Manusia yang sesuai kualifikasi menjadi sangat besar
2. Kekurangan pegawai terbesar berada tingkat pelaksana dimana dari 502 jabatan, hanya 173 jabatan yang dapat terpenuhi atau sebesar 34,46%. Di tingkat pejabat struktural dan setaranya, terdapat 7 (tujuh) jabatan kosong dari 68 jabatan yang ada atau 89,7% yang terisi. Di struktur PJLP, dari ABK sebanyak 949 orang, hanya 885 orang yang mengisi atau 93,25%
3. Dari 286 orang yang mengisi jabatan tersebut, 210 orang diantaranya pernah mengenyam pendidikan Sarjana atau setara (73,42%), sehingga kualifikasi SDM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mumpuni dari segi pendidikan. SDM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus mengembangkan Pendidikan formal dan Pendidikan keahlian sesuai jabatan.
4. Keseluruhan 3 (tiga) sasaran strategis yang diemban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, merupakan penjabaran dari 3 (tiga) urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga seluruh SDM yang ada berperan dalam pencapaian sasaran Strategis tersebut. Untuk itu, sulit menentukan 1 (satu) sasaran strategis dilaksanakan dan didukung oleh SDM tertentu saja. Sebagai contoh, para Kasatpel Kecamatan turut membantu pelaksanaan pada ketiga sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. SDM yang bergerak di bidang administrasi perkantoran dan teknologi informasi, juga turut berperan sebagai penunjang pencapaian seluruh sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. SDM tersebut terdiri dari unsur (1) ASN yang berada pada Unit Kerja Sekretariat, (2) ASN dan Tenaga Ahli yang berada pada Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (3) ASN Subbagian Tata Usaha di seluruh Unit Kerja serta (4) PJLP administrasi perkantoran (Petugas Keamanan, Petugas kebersihan dan Teknisi Mekanikal Elektrikal) di seluruh unit kerja
6. Pada sasaran Strategis Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan, dilaksanakan oleh ASN dari (1) Bidang Perindustrian dan (2) Seksi Perindustrian di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi beserta Kasatpelnya. Dari unsur PJLP, Sasaran Strategis

ini didukung oleh (1) PJLP Pendamping IKM yang berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan (2) PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM yang ditempatkan di seluruh Kecamatan. Dari unsur Tenaga Ahli, sasaran strategis ini juga didukung oleh Tenaga Ahli yang ditempatkan pada (1) Batik Betawi Hub yang berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan (2) Klinik Kemasan yang berada 5 (lima) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi serta (3) Tempat Kumpul Kreatif yang berada di beberapa wilayah.

7. Pada sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan, dilaksanakan oleh ASN dari unsur (1) Bidang Perdagangan, (2) Seksi Perdagangan di 5 Wilayah Kota Administrasi beserta Kasatpelnnya, (3) Seksi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, (4) Unit Pengelola Metrologi, (5) Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik dan (6) Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Dari unsur PJLP, Sasaran Strategis ini didukung oleh PJLP Laboran yang terdapat pada ketiga UPT dimaksud. Dari Unsur Tenaga Ahli, Sasaran Strategis ini didukung oleh Tenaga Ahli Kurator dan pemasaran yang berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Pada sasaran strategis Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi, dilaksanakan oleh ASN dari (1) Bidang Koperasi, (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (4) Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 5 (lima) Kota Administrasi, (5) Seksi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan (6) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung. Dari Unsur PJLP, sasaran strategis ini didukung oleh PJLP (1) Pendamping Kewirausahaan UKM dan ditunjang oleh (2) PJLP Keamanan dan Kebersihan yang ditugaskan di Lokasi Binaan. Dari unsur Tenaga Ahli, sasaran strategis ini didukung oleh Tenaga Ahli yang ditempatkan di Jakarta Creative Hub.
9. SDM ASN yang berada di Bidang Pengawasan, melaksanakan ketiga Sasaran Strategis tersebut dari segi teknis pengawasan dan pemeriksaan
10. Walaupun terjadi kekurangan SDM baik dari unsur ASN maupun PJLP, namun SDM yang ada tersebut telah diutilisasi secara optimal untuk mencapai ketiga Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



3.5.2 Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai sasaran strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengutilisasi Sarana dan Prasarana yang ada. Register Aset pada Unit Kerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 18 Komposisi Register Aset/Modal sampai dengan Tahun 2024

No	PD/UKPD	KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	TOTAL
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6	3.016	29	8	6	3.065
2	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	5	1.093	106	1	0	1.205
3	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	8	800	85	1	0	894
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	5	608	2	2	0	617
5	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	5	577	16	0	0	598
6	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	9	1.214	12	0	17	1.252
7	Suku Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten - kep. Seribu	0	152	2	0	0	154
8	Unit Pengelola Metrologi	0	2.637	4	3	0	2.644
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	505	1	1	0	508
10	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	42	844	591	1	0	1.478
11	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	0	621	2	0	0	623
12	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3	1.341	7	1	43	1.395
13	Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0	129	0	0	0	129
	TOTAL	84	13.537	857	18	66	14.562

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan analisis penggunaan Sarana dan Prasarana yang digunakan, di antaranya sebagai berikut:

1. Terdapat total 14.562 aset yang teregister di Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. KIB A yang merupakan inventarisasi aset tanah terdiri dari 84 Bidang tanah, dimana 42 bidang aset tanah di antaranya berada di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung yang keseluruhannya berada dalam 1 kawasan Unit Kerja tersebut. Secara umum, Aset tanah di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 5 (lima)

Wilayah Kota Administrasi dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan di wilayah tersebut, di antaranya dimanfaatkan untuk lokasi binaan dan Tempat Kumpul Kreatif. Beberapa Unit Kerja tidak memiliki aset tanah karena dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantornya memanfaatkan bangunan dan aset yang berdiri di Unit Kerja lainnya. Beberapa dari KIB A tersebut berdiri Gedung dan bangunan yang telah terinventarisasi pada KIB C

3. KIB B merupakan inventarisasi peralatan dan mesin yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. KIB B menjadi bagian terbesar dari keseluruhan KIB yang ada, yaitu sebanyak 13.537 aset. Sebagian besar KIB B merupakan peralatan perkantoran namun untuk di Unit Kerja berbasis pengujian (yaitu di Unit Pengelola Metrologi, Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah) merupakan aset peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi dan tera/tera ulang.

3.5.3 Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menggunakan dan menerapkan teknologi informasi. Pengelolaan teknologi informasi dikelola secara mandiri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Unit Pelaksana yaitu Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Daftar aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut.

1. Website Dinas PPKUKM, merupakan Website Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah publikasi informasi Dinas PPKUKM yang dapat diakses melalui situs www.disppkukm.jakarta.go.id.
2. JAKPRENEUR, merupakan sebuah aplikasi yang dirancang sebagai platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan yang dapat diakses melalui situs www.jakpreneur.jakarta.go.id
3. Aplikasi SIKEMET (Sistem Pelayanan Kemetrologian) – yang merupakan Aplikasi yang digunakan pada seluruh kegiatan pelayanan kemetrologian yang dapat diakses melalui situs www.metrologi.jakarta.go.id.
4. E-LIS (Electronic Laboratory Information System) – yang merupakan Sistem yang digunakan untuk pendaftaran dan tracking pengujian produk perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

5. SIL (Sistem Informasi Laboratorium) – yang merupakan sistem yang digunakan untuk Pendaftaran, pengiriman Invoice, Penugasan, tracking progres pengujian, Input data hasil uji, penerbitan sertifikat Hasil uji

Pada Sasaran Strategis Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan, telah didukung oleh Sistem Informasi Jakarta Entreprenur. Situs tersebut mendukung sasaran strategis dimaksud untuk menampung data peserta jakpreneur yang telah mengikuti Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan pendampingan IKM berkualitas sehingga dapat mempermudah organisasi dalam mengolah data, baik dalam pengambilan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru maupun Pendampingan IKM Berkualitas pada sasaran strategis dimaksud.

Pada sasaran strategis Peningkatan daya saing sektor perdagangan, turut didukung oleh Sistem Informasi Jakarta Entreprenur. Situs tersebut mendukung sasaran strategis dimaksud untuk menampung data peserta jakpreneur yang telah mengikuti bazar dan partisipasi pameran produk UKM sehingga dapat diketahui besaran omzet secara digital setelah mengikuti event-event. Hal ini ditujukan untuk dapat mempermudah organisasi dalam pengolahan data, baik dalam pengambilan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewirausahaan terpadu pada sasaran strategis dimaksud. Selain itu, terdapat aplikasi SIKEMET, E-LIS dan SIL yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis di sektor pengujian dan metrologi legal yang turut mendukung sasaran strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan.

Pada sasaran strategis Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi, turut didukung oleh Sistem Informasi Jakarta Entreprenur. Situs tersebut mendukung sasaran strategis dimaksud untuk menampung data peserta jakpreneur yang telah mengikuti pembinaan Kewirausahaan UKM. Hal ini ditujukan untuk dapat mempermudah organisasi dalam pengolahan data, baik dalam pengambilan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewirausahaan UKM pada sasaran strategis dimaksud.

3.5.4 Analisis Pemanfaatan Anggaran

Aktivitas-aktivitas yang teranggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta perubahannya, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas prioritas dan unggulan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dengan tercapainya output aktivitas-aktivitas tersebut maka akan menjadi salah satu faktor pengungkit ketercapaian hasil (outcome) dari sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah.



Aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan mendukung Sasaran Strategis Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan sampai dengan Tahun 2024, di antaranya:

1. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (WUIB), yang dilaksanakan di Tingkat Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten. Penumbuhan WUIB dilaksanakan melalui pelatihan para calon Wirausaha Industri Baru di sektor industri kuliner, Fashion dan Kerajinan dengan total target sebanyak 6.845 peserta. Dari target peserta tersebut, pada Tahun 2024 telah terealisasi sebesar sebanyak 6.845 peserta (100%), sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan periode Rencana Strategis Perangkat Daerah, telah terealisasi sebanyak 20.010 peserta. Melalui penumbuhan WUIB tersebut, diharapkan dapat meningkatkan omzet para WUIB sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaku usaha di sektor industri dan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap kinerja sektor industri secara umum di Provinsi DKI Jakarta melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta.
2. Pendampingan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berkualitas, yang dilaksanakan di Tingkat Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten. Pendampingan IKM berkualitas ini dilaksanakan di antaranya melalui Fasilitasi sertifikasi Halal produk IKM, fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), fasilitasi Desain kemasan, dan Fasilitasi Izin Edar. Fasilitasi sertifikasi halal produk IKM ditargetkan sebanyak 2.125 produk dan terealisasi sebanyak 2.125 produk. Fasilitasi Sertifikasi HKI ditargetkan sebanyak 5.070 produk dengan realisasi sebanyak 5.070 produk. Fasilitasi desain kemasan ditargetkan sebanyak 5.090 produk dengan realisasi sebanyak 5.090 produk. Fasilitasi izin edar telah terealisasi sebanyak 122 produk. Melalui pendampingan IKM berkualitas ini, diharapkan dapat meningkatkan IKM berkualitas yang naik kelas dan meningkatkan nilai jual dari produk-produk IKM tersebut sehingga dapat menungkit dan menjadi efek pengganda terhadap kinerja sektor industri Provinsi DKI Jakarta.
3. Pelaksanaan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk meningkatkan kinerja PDRB Sektor Industri, harus mengintensifikasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari sisi hilir, untuk itu, program P3DN merupakan salah satu cara dan salah satu penghalang teknis (Technical barrier) untuk menekan jumlah barang impor yang masuk dan beredar di dalam negeri. Dengan menekan jumlah barang impor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pemasaran produk yang berasal dari industri di dalam negeri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menargetkan pelaksanaan Business Matching P3DN sebanyak 9 kali di



Tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 9 kali dan diikuti oleh 175 perusahaan. Pelaksanaan Business Matching P3DN ini diharapkan dapat mempertemukan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para industri-industri yang telah mempunyai dan bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Dengan begitu akan meningkatkan kinerja pelaku usaha industri dan meningkatkan kinerja sektor industri secara umum melalui perhitungan PDRB sektor industri

Sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan didukung oleh beberapa aktivitas yang telah teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten Administrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun 2024, di antaranya:

1. Penyelenggaraan Pasar Murah yang teranggarkan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan Pasar Murah merupakan salah satu strategi dalam upaya stabilitasi harga bahan pokok. Dengan stabilnya harga bahan pokok maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi pemasaran serta pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB sektor Perdagangan. Penyelenggaraan pasar murah tersebut dilaksanakan sebanyak 13 kali di 5 wilayah kota administrasi. Penyelenggaraan pasar murah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Penyelenggaraan pasar murah dilakukan saat mendekati 2 (dua) Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu HBKN Idul Fitri dan HBKN Natal. Penyelenggaraan pasar murah pada tahun 2024 dilaksanakan pada awal Triwulan I dan Akhir Triwulan IV sesuai dengan waktu kedua HBKN tersebut.
2. Kurasi dan partisipasi pameran produk dan bazar yang teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Keikutsertaan pameran produk teranggarkan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan dapat dilaksanakan pada pameran dalam kota, pameran luar kota dan pameran luar negeri. Bazar Wilayah teranggarkan di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Wilayah Kota Administrasi dan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sebelum pelaksanaan partisipasi pameran dan bazar, perlu dilaksanakan kurasi bagi para calon peserta. Kurasi tersebut menentukan tingkatan partisipasi pameran dan bazar yang dapat diikuti. Pelaksanaan kurasi dan keikutsertaan pameran produk ini diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk-produk binaan dan meningkatkan daya jual serta memperkenalkan produk binaan yang tergabung dalam program Jakarta Entrepreneur. Untuk kegiatan partisipasi pameran dalam kota, telah dilaksanakan pada 14 event dan mengikutsertakan 88 UKM. Partisipasi pameran luar kota telah dilaksanakan pada 6 event dan mengikutsertakan 47 UKM. Partisipasi pameran luar negeri telah dilaksanakan pada 6 event di 6 negara dengan mengikutsertakan 21 UKM. Untuk bazar di wilayah, telah

dilaksanakan sebanyak 431 kali dan diikuti oleh 12.431 pelaku usaha. Selain itu, di tingkat Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 5 Wilayah Kota Administrasi juga telah dilakukan program Jumat Beli Lokal (JBL) yang menggandeng toko online dalam peningkatan pemasaran para pelaku usaha khususnya yang terdaftar di Jakpreneur. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga telah melaksanakan program Jakpreneur Goes To Mall (JGTM) yang dilaksanakan sebanyak 18 kali di Mal Grand Indonesia yang melibatkan 72 UKM.

3. Perlindungan konsumen, melalui pemberdayaan kelembagaan Perlindungan konsumen, pengawasan perdagangan, pengawasan barang beredar dan jasa dan metrologi legal dan pelayanan pengujian serta metrologi legal. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan, pengawasan barang beredar dan jasa serta metrologi legal teranggarkan dan dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pelaksanaan Pelayanan pengujian serta metrologi legal dilaksanakan oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Unit Pengelola Metrologi, Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik dan Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga ad-hoc yang dibentuk di luar struktur pemerintahan yang beranggotakan unsur PNS dan unsur masyarakat. Dasar pembentukan BPSK melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana pada Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada APBD Provinsi melalui mekanisme belanja hibah. BPSK mempunyai fungsi untuk memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dipasarkan di wilayah Jakarta khususnya sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB sektor perdagangan. Pada Tahun 2024, BPSK telah menerima keluhan sebanyak 61 pengaduan dengan keluhan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 61 pengaduan atau tercapai 100%. Pada lingkup pelayanan pengujian, terlaksana pengujian di Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik sebanyak 1.452 uji dan sebanyak 1.418 uji di antaranya memenuhi syarat mutu atau terealisasi sebanyak 97,66% dan terlaksana pengujian di Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebanyak 3.732 uji dan sebanyak 3.554 uji di antaranya memenuhi syarat mutu atau



terrealisasi sebanyak 95,23%. Pada lingkup metrologi legal, telah dilaksanakan tera/tera ulang pada alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan sebanyak 859.156 alat

Sasaran Strategis Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi didukung oleh beberapa aktivitas yang telah teranggarkan di Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 6 Kota/Kabupaten Administrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun 2024, di antaranya:

1. Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi yang teranggarkan dan dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini memfasilitasi pemberian Akta Pendirian Koperasi untuk dapat didaftarkan dan mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) sehingga usaha koperasi yang dijalani menjadi legal formal. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas koperasi dari segi kelembagaan. Pada Tahun 2024 ditargetkan Akta Pendirian Koperasi dapat diberikan kepada 60 koperasi dan terealisasi sebanyak 60 koperasi atau tercapai sebanyak 100%.
2. Bimbingan Teknis terkait pemberdayaan dan kelembagaan koperasi yang dilaksanakan dan teranggarkan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan diantaranya melalui pelatihan transformasi digitalisasi menuju koperasi modern, pelatihan peningkatan kelembagaan koperasi, bimbingan teknis perhitungan sisa hasil usaha koperasi dan bimbingan teknis penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas koperasi dan volume usaha koperasi, khususnya yang menjadi lingkup binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada Tahun 2024 pelatihan-pelatihan tersebut ditarget menyasar pada 565 SDM Koperasi dengan realisasi sebanyak 576 koperasi atau tercapai sebanyak 101,9%
3. Pemeriksaan Kesehatan koperasi teranggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan koperasi dilaksanakan terhadap koperasi aktif yang berada pada lingkup pembinaan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, perlu diketahui koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan hasil pemeriksaan koperasi, 2.368 koperasi merupakan koperasi aktif. Melalui pemeriksaaan koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota koperasi dalam menjaga kesehatan koperasi dan meningkatkan kualitas koperasi tersebut.



4. Pembinaan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang teranggarkan dan dilaksanakan di 6 (enam) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota/Kabupaten Administrasi. Pada Tahun 2024 dilaksanakan pembinaan softskill ini bagi 80 orang per gelombang per kecamatan, sehingga total target pelatihan sebanyak 33.850 UKM. Melalui pembinaan softskill ini diharapkan dapat tumbuh nilai-nilai kewirausahaan dalam upaya mencapai kemandirian baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya meningkatkan jumlah wirausaha secara kuantitatif untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 sebanyak 7,48%. Secara kualitatif, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga terus meningkatkan kualitas dari produk dan pelaku wirausaha, dimana salah satunya melalui pembinaan softskill ini. Pembinaan softskill ini menggandeng stakeholder lain untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas wirausaha. Pada Tahun 2024, dengan target pelatihan sebanyak 33.850 UKM, telah terealisasi sebanyak 36.267 UKM atau tercapai sebanyak 107,14%.
5. Penataan Sarana dan Prasarana PKL yang teranggarkan dan dilaksanakan di 6 (enam) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Secara umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana (sarpras) PKL, yaitu Lokasi Promosi (Lokprom), Lokasi Binaan (Lokbin) dan Lokasi Sementara (Loksem), dengan rincian terdapat 4 (empat) lokprom yang menampung 320 pedagang dan terdapat 20 lokbin yang menampung 3.632 pedagang serta 175 Loksem yang menampung 7.149 pedagang. Lokasi sarpras PKL tersebut digunakan sebagai salah satu sarana inkubasi bagi para pedagang informal untuk dapat berkembang dan melanjutkan usahanya. Dengan kondisi sarpras yang perlu dilakukan pemeliharaan, maka tahun 2024 telah dilaksanakan penataan sarpras PKL bagi 22 loksem dan 1 lokbin.
6. Penyelenggaraan Jakarta International Trade Expo (JITEX) yang teranggarkan dan dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan JITEX merupakan penyelenggaraan JITEX tahun pertama pelaksanaan diharapkan dapat terus berlanjut pelaksanaannya. JITEX merupakan kegiatan penyelenggaraan pameran di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan para pelaku usaha dan para Jakpreneur yang menjadi binaan 6 (enam) Perangkat Daerah yang tergabung dalam program Jakpreneur. Pada kegiatan tersebut, juga menghadirkan para calon-calon investor dari luar dan dalam negeri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemasaran dan memperkenalkan produk di kancah global. Melalui program ini, telah terjadi transaksi riil sebanyak



Rp.1.540.501.783 dan transaksi potensial sebanyak Rp.12.863.804.477.250. pengunjung yang mendatangi event ini sebanyak 11.310 orang dengan jumlah exhibitor sebanyak 335 pelaku serta sebanyak 258 buyer dan investor yang berasal dari 10 negara.



Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi



Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi



Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Jakarta Pusat



Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Jakarta Selatan



Jakarta International Trade Expo (JITEK)



Kegiatan Business Matching 17 diselenggarakan oleh Dinas PPKUKM di Walikota Jakarta selatan



Bazar Jakarta Entrepreneur Jakarta Pusat



Bazar Jakarta Entrepreneur Jakarta Selatan



Bazar Jakarta Entrepreneur Jakarta Timur



Pengawasan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)



Sidang Tera Ulang UTTP



Pengawasan UTTP di SPBU

Gambar 3. 3 Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan mendukung Sasaran Strategis



3.5.5 Analisis Efisiensi

Untuk menganalisis Efisiensi dalam pelaksanaan Sasaran Strategis di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka digunakan acuan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran analisis efisiensi ini dilakukan pada Tingkat Sasaran Strategis Perangkat Daerah sehingga dasar perhitungan menggunakan komponen pembantuk dari sasaran strategis tersebut yang berada 1 (satu) tingkat di bawah sasaran strategis, yaitu Program. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan analisis efisiensi ini adalah pagu anggaran beserta realisasi anggaran dari masing-masing program dalam 1 (satu) sasaran strategis dan capaian kinerja program yang membandingkan Realisasi dengan target indikator program. Dengan belum adanya pembobotan antar indikator kinerja di dalam 1 (satu) sasaran dan dalam 1 (satu) program, maka seluruh indikator diasumsikan berbobot sama. Rumus Efisiensi yang digunakan adalah sebagai berikut

$$Efisiensi\ Sasaran\ Strategis = \frac{\sum_{i=1}^n (((Pagu\ Anggaran\ Program_i \times Capaian\ Kinerja\ Program_i) - Realisasi\ Anggaran\ Program_i))}{\sum_{i=1}^n (Pagu\ Anggaran\ Program_i \times Capaian\ Kinerja\ Program_i)} \times 100\%$$

Tabel 3. 19 Efisiensi Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Indikator	Capaian Program	Pagu	Realisasi	Capaian	
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan										99,14%
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	4	36,51	912,75	544,65	66.697.488.468	62.777.054.681	94,12%	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	55	97,1	176,55					
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Tertib Perizinan	60	60,21	100,35	100,35	9.807.749	9.750.000	99,41%	
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan										99,08%
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pemanfaatan SKA	61	70	114,75	113,6	N/A	N/A	N/A	
		Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online	75	84,34	112,45					



No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Indikator	Capaian Program	Pagu	Realisasi	Capaian	
		Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)								
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	14	5,5	160,71	160,71	254.161.378	221.154.300	87,01%	
5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta (USD)	11.542.072.344	12.585.150.000	109,04	109,04	6.485.224.350	6.125.311.109	94,45%	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	100	100	100	105,96	7.762.410.578	7.357.891.202	94,79%	
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	81	95,49	117,89					
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	100	100					
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	30	30	100	100	40.775.161.309	37.100.528.822	90,99%	
Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi										99,09%
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	60	67,66	112,77	112,77	7.800.000	7.800.000	100,00%	
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	60	65,28	108,80	108,80	748.445.752	735.079.390	98,21%	
10	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	2	4,62	231	168,21	241.519.279	193.487.400	80,11%	
		Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	0,48	0,506	105,42					
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	3	3,27	109	109	65.338.433.349	62.395.498.177	95,50%	
12	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	80	82,63	103,29	103,29	233.596.279	226.627.800	97,02%	
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100	100	181.050.903.519	168.993.686.636	93,34%	
RATA-RATA EFISIENSI										99,10%

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan analisis Efisiensi sebagai berikut:

1. Diasumsikan bahwa perhitungan rata-rata capaian Sasaran Indikator Kinerja yang berada di atas 110% telah dijustifikasi menjadi 110%
2. Rata-Rata Capaian Program sebesar 106,43% dan realisasi anggaran sebesar 93,95%, berdasarkan perhitungan, rata-rata efisiensi pada ketiga sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 99,10%
3. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis melalui program-program yang diampu telah berjalan secara efisien menggunakan anggaran yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.5.6 Analisis Pemanfaatan Cross-Cutting Kinerja

Rencana Kinerja Strategis yang beririsan dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah saling mendukung pencapaian masing-masing kinerja tersebut. Rencana Kinerja Strategis di antaranya sebagaimana yang telah disampaikan, yaitu pada Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (Renaksi KSD) dan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi pada Sub-KSD Pengembangan UMKM mendukung pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya pada Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi. Pada Sub-KSD ini berisi upaya-upaya dalam meningkatkan Wirausaha dari sisi kuantitatif maupun kualitatif yang diampu oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan PKT sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. 6 (enam) Perangkat Daerah penyelenggara PKT, yaitu (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, (3) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (4) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, (5) Dinas Sosial, dan (6) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Rencana Aksi KSD yang tercantum pada Sub-KSD ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah dalam meningkatkan jumlah dan kualitas Wirausaha Industri Baru.



Lebih lanjut pada KSD Akselerasi pertumbuhan Ekonomi Pasca pandemi pada Sub-KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan, mendukung pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, khususnya pada Sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan. Upaya-upaya dalam pengendalian Inflasi yang tercantum dalam Renaksi KSD tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengendalian dan stabilitasi harga bahan pokok yang menjadi salah satu program pada Sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan. Dengan begitu, Sub-KSD tersebut juga turut mendukung pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan.

Upaya-upaya Penyelenggaraan PKT yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT, juga turut didukung oleh Perangkat Daerah dan BUMD lain, di antaranya Walikota dan Bupati Administrasi beserta jajaran pamongnya dalam mensosialisasikan program PKT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengurus formalitas berusaha dari para anggota PKT, Bank DKI dalam upaya membantu pemodalan para peserta PKT, Badan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengelolaan sistem E-Order, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mendukung domain Jakrepeneur.jakarta.go.id serta Biro Perekonomian dan Keuangan Setda yang senantiasa membantu mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKT.

3.6 HAMBATAN DAN DUKUNGAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Terdapat beberapa hambatan dan dukungan dalam pencapaian Kinerja Stategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024. Hambatan dan dukungan tersebut sebagaimana masing-masing sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja. Hambatan dan dukungan sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 20 Hambatan dan Dukungan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
	SASARAN STRATEGIS		
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	1. Data PDRB Tahunan baru terbit paling cepat di bulan Februari tahun berikutnya sehingga belum dapat dilakukan analisis sampai dengan LKIP ini terbit	1. Kontribusi PDRB sektor industri yang selalu menempati posisi 3 teratas dari tahun ke tahun



No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
		2. Kecenderungan data kontribusi PDRB sektor Industri yang terus menurun tiap tahun menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja strategis 3. Perhitungan kontribusi PDRB sebagai pohon kinerja yang kurang menggambarkan kinerja sektor industri. Hal ini diakibatkan sektor perdagangan dan sektor industri yang menjadi dasar perhitungan kinerja strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selalu menempati posisi 3 teratas dalam pencapaian kontribusi PDRB tiap tahunnya sehingga pencapaiannya sudah optimal dan sulit mempengaruhi pencapaian PDRB sektor lain	2. Dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Perwakilan DKI Jakarta dalam menyampaikan data dan analisis terkait perkembangan industri regional 3. Adanya temu bisnis (business matching) yang dapat meningkatkan pangsa pasar industri terutama industri kontributor PDRB 4. Penguatan peran urusan perindustrian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	1. Data PDRB Tahunan baru terbit paling cepat di bulan Februari tahun berikutnya sehingga belum dapat dilakukan analisis sampai dengan LKIP ini terbit 2. Walaupun terdapat kecenderungan yang meningkat pada PDRB sektor perdagangan, namun perhitungan kontribusi PDRB sebagai pohon kinerja yang kurang menggambarkan kinerja sektor perdagangan. Hal ini diakibatkan sektor perdagangan dan sektor industri yang menjadi dasar perhitungan kinerja strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selalu menempati posisi 3 teratas dalam pencapaian kontribusi PDRB tiap tahunnya sehingga pencapaiannya sudah optimal dan sulit mempengaruhi pencapaian PDRB sektor lain	1. Kontribusi PDRB sektor perdagangan selalu menempati posisi teratas dari tahun ke tahun 2. Penguatan peran sebagai kota Perdagangan global melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 3. Dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lainnya dalam menyampaikan data dan analisis terkait perkembangan industri regional
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Pola pikir masyarakat untuk berwirausaha yang masih rendah. Ingin sukses namun kurangnya usaha yang dapat dilakukan 2. Syarat dalam memperoleh permodalan yang masih terkendala utamanya dalam hal agunan, kelayakan kredit dan laporan keuangan 3. Kesulitan UKM dalam melakukan inovasi produk	1. Penguatan peran pengembangan kewirausahaan melalui adanya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 2. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam meningkatkan pengembangan kewirausahaan terpadu, baik yang



No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
		4. Masih terdapat UKM yang masih belum konsisten terhadap kualitas pesanan dalam jumlah yang besar, utamanya pada UKM kuliner	dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah pengampu dan Biro Perekonomian dan Keuangan Setda sebagai koordinator 3. Sosialisasi program PKT yang gencar dilakukan baik dari internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun dari pihak Perangkat Daerah lain.
4	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	1. Syarat dalam memperoleh permodalan yang masih terkendala utamanya dalam hal agunan, kelayakan kredit dan laporan keuangan 2. Kesulitan UKM dalam melakukan inovasi produk 3. Masih terdapat UKM yang masih belum konsisten terhadap kualitas pesanan dalam jumlah yang besar, utamanya pada UKM kuliner 4. Masih terdapat Koperasi yang belum melakukan pembaharuan data di sistem Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi	1. Penguatan peran pengembangan kewirausahaan melalui adanya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 2. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam meningkatkan pengembangan kewirausahaan terpadu, baik yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah pengampu dan Biro Perekonomian dan Keuangan Setda sebagai koordinator 3. Sosialisasi program PKT yang gencar dilakukan baik dari internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun dari pihak Perangkat Daerah lain. 4. Dukungan Pemerintah Pusat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan kelembagaan koperasi dan UKM
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	1. Data PDRB Tahunan baru terbit paling cepat di bulan Februari tahun berikutnya sehingga belum dapat dilakukan analisis sampai dengan LKIP ini terbit 2. Tingginya biaya overhead dan biaya pekerja di DKI Jakarta	1. Dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Perwakilan DKI Jakarta dalam menyampaikan data dan analisis terkait perkembangan industri regional 2. Adanya temu bisnis (business matching) yang dapat meningkatkan pangsa pasar industri terutama industri kontributor PDRB 3. Penguatan peran urusan perindustrian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	1. Data PDRB Tahunan baru terbit paling cepat di bulan Februari tahun berikutnya sehingga belum dapat dilakukan analisis sampai dengan LKIP ini terbit	1. Penguatan peran sebagai kota Perdagangan global melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta



No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
		2. Tingginya biaya pekerja DKI Jakarta	2. Dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lainnya dalam menyampaikan data dan analisis terkait perkembangan industri regional
SASARAN KHUSUS			
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1. Waktu yang tersedia untuk publikasi event atau kegiatan pendukung Strategi Komunikasi terbatas, yang mengakibatkan kurang maksimal hasil publikasi nya	1. adanya Unit kerja khusus yang menangani komunikasi publik yaitu di Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data yang berkualitas	1. Adanya perbedaan format data yang dimiliki oleh produsen data dengan yang ditetapkan oleh Sekretariat SDI Provinsi DKI Jakarta, sehingga diperlukan pengolahan data lebih lanjut sesuai dengan format yang telah ditetapkan	1. Adanya dukungan dari berbagai produsen data (Bidang dan UPT) dalam pemenuhan kebutuhan data
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1. Jaringan Server yang kurang lancar 2. Jika ditemukan kendala, proses pengembalian penginputan inventarisasi untuk perbaikan data agak lama.	1. Penggunaan aset mobile memberikan kemudahan bagi SKPD/UKPD dalam pembuatan ruangan dan pencetakan KIR
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1. Masih ditemukan sertifikat atau nilai TKDN yang tidak sesuai pada e-katalog LKPP. 2. Masih banyak ditemukan bahwa harga barang pada e-katalog LKPP lebih mahal daripada marketplace biasa. 3. Banyak ATPM (jasa/reparasi) yang masih menggunakan suku cadang produk impor. 4. Harga barang produk impor masih lebih murah daripada PDN 5. Update data Bigbox LKPP tidak realtime. 6. Belum ada mekanisme yang jelas terkait titik sumber tarikan data dari SPSE agar bisa muncul di Bigbox LKPP. 7. Terdapat beberapa data Pelaksanaan yang tercatat beberapa kali lipat (double counting) sehingga nilai pelaksanaan lebih besar dari pagu anggaran	1. Peralihan seluruh rekrutmen penyedia jasa non ASN menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 2. Kewajiban belanja 100% produk UMKM untuk penyediaan makan minum rapat dan aktivitas lapangan menggunakan sistem e-Order. 3. Koordinasi intens dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaporan P3DN, dan kendala yang dihadapi. 4. Pendelegasian tanggung jawab pada masing-masing Tim P3DN pada masing-masing perangkat daerah. 5. Monitoring dan evaluasi berkala atas progres capaian P3DN masing-masing Perangkat Daerah serta pelaksanaan



No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
			pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara proaktif.
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1. Jaringan server yang kurang lancar pada aplikasi pengembangan kompetensi PNS	1. Disediakan banyak opsi dan kanal dalam mencapai pengembangan kompetensi PNS
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1. Sistem CMS Pengumpulan Aset pengetahuan sulit di akses untuk melakukan upload	1. Dukungan dari unit kerja di lingkungan Dinas PPKUKM, sehingga cukup banyak opsi manajemen pengetahuan yang dapat di upload untuk memenuhi target sebanyak 4 aset pengetahuan dalam 1 tahun
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1. Kurangnya personil yang telah mengikuti pengembangan kompetensi manajemen risiko	1. Bimbingan/coaching intensif dari Inspektorat bersama BPKP dalam penyusunan Profil Risiko Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama sekitar 1 bulan
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1. Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output 2. Nilai kontrak lelang di bawah nilai pagu anggaran, sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal 3. Nilai harga komponen di e katalog di bawah nilai pagu anggaran, sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal	1. peningkatan capaian kinerja strategis yang mendorong penilaian
SASARAN OPERASIONAL			
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1. Tidak ada hambatan, karena di tahun 2024 tidak ada Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1. Penggunaan sistem informasi untuk tindak lanjut arahan gubernur
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1. Beberapa laporan/aduan yang masuk ke akun CRM Dinas PPKUKM tidak sesuai dengan tupoksi dan tidak bisa dilakukan ticketing pindah SKPD, sehingga tindak lanjut tidak sesuai kewenangannya.	1. Penggunaan sistem informasi untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat 2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja di lingkungan Dinas PPKUKM dengan respon cepat untuk menindaklanjuti laporan.



No	Sasaran	Hambatan	Dukungan
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1. Terdapat temuan yang di luar kendali dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Penyelesaian temuan dimaksud membutuhkan waktu yang cukup panjang dan terkait dengan aparat penegak hukum.	1. Adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian temuan (BPKP, Pengadilan Negeri, BPKD, BPAD, Biro Hukum, Inspektorat, BPN) 2. Adanya kerjasama bantuan konsultan hukum dan Kantor Jasa Penilaian Publik terkait permasalahan kerjasama aset

3.7 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH

3.7.1 Evaluasi Mandiri atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilaksanakan Evaluasi Mandiri secara internal atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi, yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Internal.

Pada Komponen Perencanaan Kinerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan dan menyampaikan hal-hal terkait dengan perencanaan kinerja selama Tahun 2024, di antaranya sebagai berikut:

1. Telah disusun, dicetak dan disampaikannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 kepada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan/aktivitas.
2. Sebagai Dokumen penganggaran, DPA juga memuat target kinerja yang harus dicapai dari sisi indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang juga harus dipedomani dalam pelaksanaan aktivitas Tahun 2024 ini.
3. Sebagai tahun kedua pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah tingkat Perangkat Daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026, indikator kinerja yang diperjanjikan pada



Tahun 2024 ini menyadur dari Dokumen tersebut. Untuk menunjang keberlanjutan dan perbaikan yang terus-menerus, indikator kinerja yang diperjanjikan ini juga mempedomani indikasi realisasi indikator kinerja dimaksud pada Tahun 2023.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Penganggaran Tahun 2025 di tingkat Perangkat Daerah. Dokumen-dokumen tersebut selaras dan paralel dengan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Penganggaran Tahun 2025 di tingkat Pemerintah Daerah.
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah yang telah disusun yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025. Dokumen tersebut telah disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan mulai dari Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) sampai dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja). Di dalam dokumen tersebut juga menyediakan informasi indikator kinerja dari masing-masing tingkatan kinerja yang dilengkapi dengan indikasi pagu anggaran tahun bersangkutan sebagai pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran kinerja dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Selain itu, Dokumen tersebut telah selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 tingkat Pemerintah Daerah, yaitu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
6. Dokumen Penganggaran Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Provinsi DKI Jakarta. dokumen penganggaran Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah yang telah disusun yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025. Dokumen-dokumen penganggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut telah disusun mulai dari fase Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 yang dilanjutkan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI atas Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan penyusunan Anggaran Kas pada DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025.
7. Dengan memperhatikan kondisi tahun anggaran berjalan, perlu adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan pagu anggaran tersedia. Untuk itu, Dinas Perindustrian telah mengajukan usulan perubahan anggaran, baik melalui mekanisme pergeseran anggaran maupun perubahan. Usulan perubahan anggaran tersebut telah melalui tahapan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama TAPD.



8. Sebagaimana Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah awal Tahun / murni, Dokumen-dokumen terkait Perencanaan Pembangunan Perubahan dan Penganggaran Perubahan Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah juga telah mengikuti mekanisme, tahapan, ketepatan waktu dan selaras.mekanisme dan tahapan yang diikuti telah sesuai dan menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Perubahan dan Penganggaran Perubahan Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah, yaitu berupa Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 yang selaras dengan dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan Perubahan dan Penganggaran Perubahan Tahun 2025 tingkat Pemerintah Daerah.
9. Sejalan dengan penyusunan Dokumen Penganggaran, telah disusun Dokumen Matriks Pohon Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025. Dokumen matriks pohon kinerja tersebut telah disusun dan diselaraskan dengan target-target indikator-indikator kinerja yang telah tercantum pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Penganggaran Tahun 2025 tingkat Perangkat Daerah di seluruh tingkatan kinerja, baik di tingkat Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
10. Dalam penyusunan Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut, telah disusun tepat waktu, selaras dan telah mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam penyusunan dokumen-dokumen dimaksud serta telah disusun secara partisipatif bersama unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah demi mewujudkan budaya kinerja yang efektif di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Perencanaan Kinerja Individu telah selaras dengan Perencanaan Kinerja Organisasi dan sejalan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan tingkat Perangkat Daerah Tahun 2025.
12. Pada Perencanaan Kinerja Individu tingkat Kepala Perangkat Daerah, telah disusun, ditetapkan dan ditandatangani bersama Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 secara berjenjang dan berkelanjutan. Perkin telah disusun dan diambil dari Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Relevan Lainnya. Pada Sasaran Strategis, telah diambil sebagaimana yang terdapat pada Dokumen Perencanaan Pembangunan tingkat Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan ketercapaian target di Tahun sebelumnya sehingga Perkin yang telah ditetapkan secara konsisten, berkelanjutan dan menantang (challenging). Renaksi merupakan uraian tahapan kunci dari IKU yang menghasilkan output antara. Dalam mencapai

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, telah disusun Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

13. Pada Perencanaan Kinerja Individu di seluruh Jajaran Kepala Perangkat Daerah telah disusun mulai dari Matriks Pembagian Peran dan Hasil (MPPH) Tahun 2024 antar tingkatan jabatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. MPPH Tahun 2024 disusun berdasarkan Perkin Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja Organisasi sesuai dengan tingkatannya. MPPH telah disusun kepada seluruh jajaran sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya secara berjenjang mulai dari Pejabat Administrator dan dilanjutkan diturunkan kepada Pejabat Pengawas atau setara dan terakhir kepada masing-masing Pejabat Pelaksana. MPPH Tahun 2024 tersebut menjadi dasar penetapan Perkin Tahun 2024 masing-masing jabatan dan diperjanjikan secara berjenjang antar jabatan. MPPH juga telah disusun sebagai dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 dan SKP tersebut digunakan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2024 untuk menetapkan target triwulanan masing-masing kinerja dari masing-masing Individu untuk diinput ke dalam sistem Renkin masing-masing Individu.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu target-target Rencana Aksi (Renaksi) yang terdapat pada 11 (sebelas) Sub-KSD. Target-target yang terdapat pada Renaksi Sub-KSD tersebut, telah diturunkan secara berjenjang mulai dari tingkat Jabatan Administrator (JA) sampai dengan Jabatan Pengawas (JP) dan setaranya sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya.

Pada Komponen Pengukuran Kinerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan dan menyampaikan hal-hal terkait dengan pengukuran kinerja selama Tahun 2024, di antaranya sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja organisasi maupun pengukuran kinerja individu yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta pada lingkup waktu yang telah ditentukan
2. Pengukuran Kinerja Organisasi dan Pengukuran Kinerja Individu telah memanfaatkan Teknologi Informasi, mulai dari pengumpulan data realisasi kinerja dan validasi kinerja tersebut. Pengukuran Kinerja Organisasi yang sekaligus dapat melaksanakan pengukuran Kinerja Individu

dilaksanakan melalui 2 (dua) sistem Informasi, yaitu (1) Sistem Informasi E-Monev, dan (2) Sistem Informasi Monev KSD. Sistem E-Monev telah dirancang pengukuran kinerja secara individu sehingga pengukuran kinerja organisasi di sistem informasi ini, juga dapat sekaligus melaksanakan pengukuran kinerja individu. Sistem Monev KSD hanya dirancang pengukuran kinerja secara organisasi namun sudah tercantum pengampu dari masing-masing kinerja tersebut sampai ke tingkat Pejabat Pengawas. Seluruh data hasil pengukuran Kinerja Organisasi yang selaras dengan Pengukuran Kinerja Individunya di kedua Sistem Informasi ini dialirkan lebih lanjut melalui Sistem Informasi E-TPP sebagai kanal Sistem Informasi Akhir untuk perangkuman Pengukuran Kinerja Individu. Selain kanal akhir perangkuman pengukuran kinerja individu, Sistem E-TPP juga dapat melaksanakan pengukuran kinerja individu lainnya di luar sistem E-Monev dan Monev KSD namun keseluruhannya telah tercantum di Rencana Kinerja masing-masing individu. Rangkuman Pengukuran Kinerja Individu berdasarkan masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan melalui 3 (tiga) Sistem Informasi, yaitu (1) melalui Sistem E-Monev untuk mengukur Kinerja dari Sasaran Strategis, dan (2) melalui Sistem E-TPP untuk mengukur Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional, serta (3) Sistem Monev KSD untuk mengukur kinerja dari Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
 - b. Pengukuran Kinerja Jabatan Administrator (JA) dilakukan melalui 2 (dua) Sistem Informasi, yaitu (1) Melalui Sistem E-Monev untuk mengukur Kinerja dari Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, dan (2) melalui sistem E-TPP untuk mengukur kinerja dari Rencana Kinerja di luar Sasaran Program dan Kegiatan
 - c. Pengukuran Kinerja Jabatan Pengawas (JP) dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional (JF) dilakukan melalui 2 (dua) Sistem Informasi, yaitu (1) Melalui Sistem E-Monev untuk mengukur Kinerja dari Sasaran Subkegiatan, dan (2) melalui sistem E-TPP untuk mengukur kinerja dari Rencana Kinerja di luar Sasaran Subkegiatan
 - d. Pengukuran Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Kepala Satuan Pelaksana dilakukan melalui Sistem E-TPP untuk mengukur seluruh Kinerja dari Rencana Kinerja (Renkin)
3. Dokumen pendukung pengukuran kinerja dari masing-masing target kinerja telah didokumentasikan di dalam sistem informasi bersangkutan
 4. Penginputan pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan di tiap triwulannya dan telah divalidasi secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing jabatan
 5. Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi pemantauan progres pelaksanaan dan pengukuran kinerja di tingkat Perangkat Perangkat Daerah



6. Pengukuran kinerja pada Triwulan X akan dijadikan dasar dalam penentuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh jabatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Triwulan X+1

Pada Komponen Pelaporan Kinerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan dan menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaporan kinerja selama Tahun 2024, di antaranya sebagai berikut:

2. Hasil dari penginputan dan pengukuran kinerja telah didokumentasikan dan telah dilakukan analisis melalui Laporan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Perjanjian Kinerja (Eval Perkin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Semester I Tahun 2024
 - b. Evaluasi Perjanjian Kinerja (Eval Perkin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Semester II Tahun 2024
 - c. Evaluasi Rencana Kerja (Eval Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan I Tahun 2024
 - d. Evaluasi Rencana Kerja (Eval Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II Tahun 2024
 - e. Evaluasi Rencana Kerja (Eval Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan III Tahun 2024
 - f. Evaluasi Rencana Kerja (Eval Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan IV Tahun 2024
 - g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024
3. Laporan Eval Perkin Semesteran Tahun 2024 dan Laporan Eval Renja Triwulanan Tahun 2024 disusun dan dianalisis yang berpedoman pada sistematika yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah dilaporkan melalui sistem Monev KSD sebagai bagian dari salah satu Renaksi KSD
4. Penyusunan LKIP Tahun 2024 telah difasilitasi penyusunannya oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda sebanyak 2 (dua) kali dan telah dilakukan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi yang disampaikan serta telah melalui proses tinjauan oleh Biro Perekonomian dan Keuangan Setda.
5. LKIP Tahun 2024 akan dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda dan Inspektur serta melalui sistem informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui sistem esr.menpan.go.id

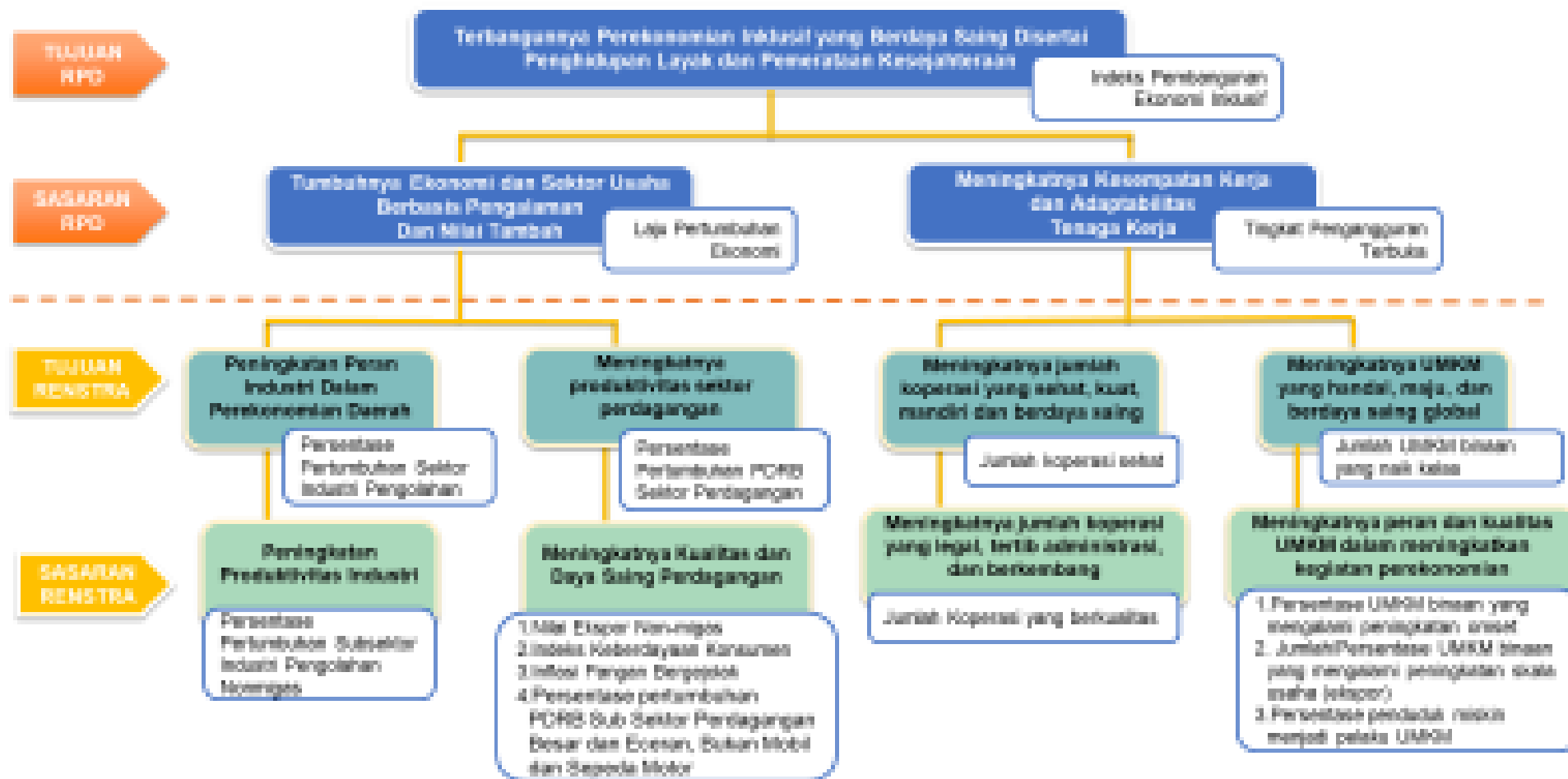
Pada Komponen Evaluasi Internal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan dan menyampaikan hal-hal terkait dengan evaluasi interna selama Tahun 2024, di antaranya sebagai berikut:



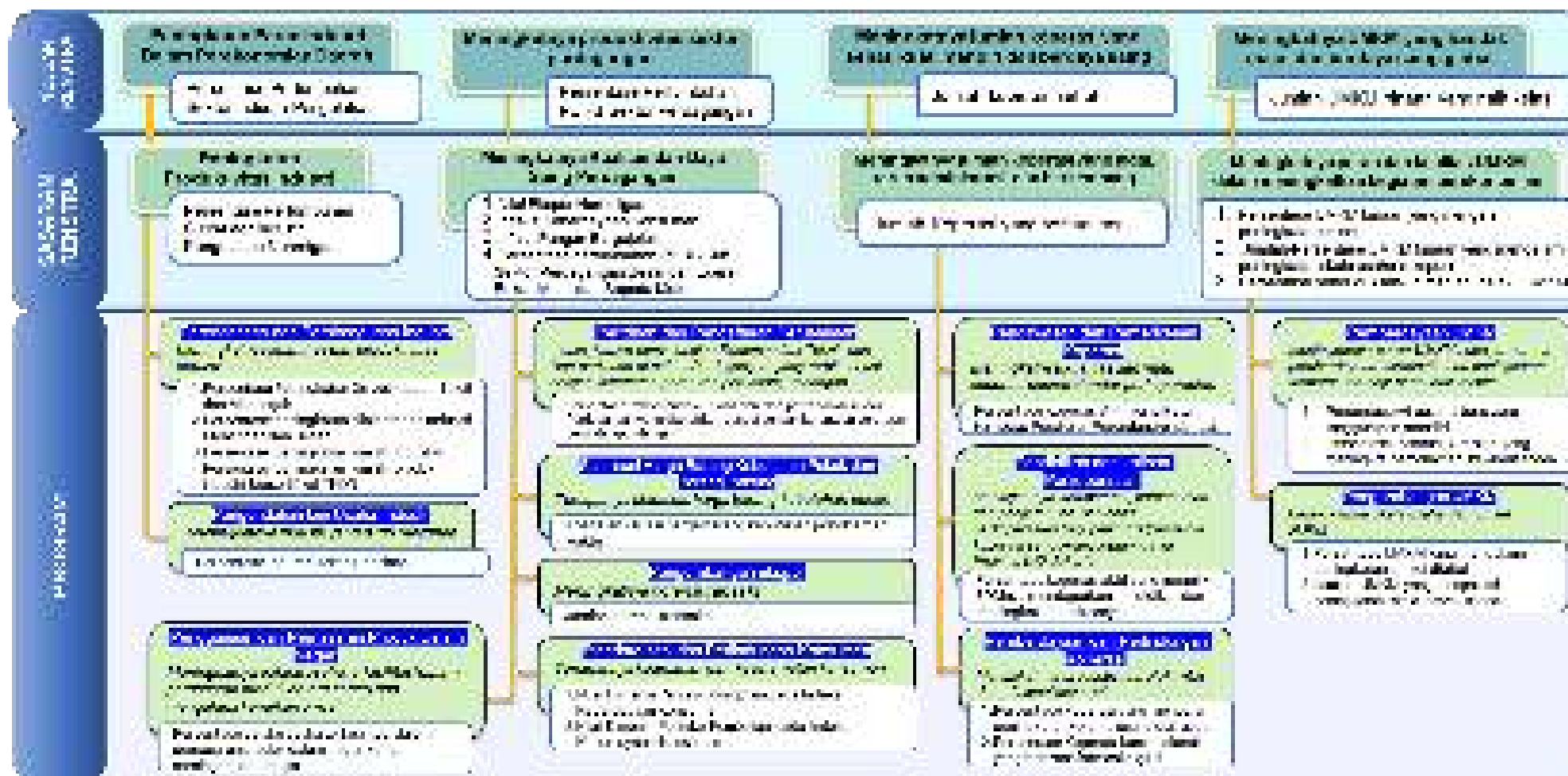
1. telah dilaksanakan berbagai rangkaian rapat dan pertemuan dalam rangka monitoring, pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kurun waktu masing-masing tahapan kinerja
2. Melalui dokumen LKIP Perangkat Daerah ini, Evaluasi internal SAKIP telah dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.7.2 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2 (dua) perangkat daerah berkesempatan menyampaikan paparan implementasi SAKIP Tahun 2023, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu Perangkat Daerah pemapar. Atas dasar rekomendasi tim tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun usulan perbaikan pohon kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tergambar pada grafik di bawah.



Gambar 3. 4 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja Strategis Perangkat Daerah



Gambar 3. 5 Usulan Perbaikan Pohon Kinerja Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Usulan Perbaikan Pohon Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat disampaikan analisis sebagai berikut:



1. Dalam perumusan perbaikan pohon kinerja ini telah mempertimbangkan kerangka logis (logical framework) masing-masing Urusan Bidang Pemerintahan yang menyadur dari kebijakan Pemerintah Pusat, peraturan perundang-undangan maupun tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan di Tingkat Pemerintah Daerah
2. Perbaikan pohon kinerja telah mempertimbangkan turunan (cascading) dari tingkat paling atas (yaitu Tujuan Strategis) sampai dengan tingkat paling bawah (yaitu sub kegiatan) baik dari sisi nomenklatur sasaran yang bertingkat menyesuaikan nomenklatur tingkatannya dan sasaran yang ingin dituju maupun dari sisi indikator yang dapat mendukung ketercapaian sasaran tersebut
3. Basis pohon kinerja perangkat daerah masih menggunakan Pohon Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu menyasar sasaran RPD Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah dan Sasaran RPD Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga kerja
4. Sasaran RPD Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah akan diturunkan di tingkat Tujuan Strategis Perangkat Daerah menjadi Tujuan Strategis Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Daerah dan Tujuan Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan. Pada kedua Urusan tersebut, Indikator kinerja yang mendukung Tujuan Strategis tersebut yang awalnya kontribusi PDRB sektoral diubah menjadi persentase pertumbuhan PDRB Sektoral, dimana Persentase pertumbuhan PDRB Sektoral berada pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Kontribusi PDRB Sektoral dirasa tidak menggambarkan kinerja sektoral karena sangat tergantung dari pelemahan PDRB sektor lainnya, sedangkan pertumbuhan PDRB Sektoral dapat menggambarkan deviasi pertumbuhan kinerja sektoral pada tahun bersangkutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
5. Sasaran RPD Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga kerja diturunkan di tingkat Tujuan Strategis Perangkat Daerah menjadi 2 (dua) Tujuan Strategis, yang sebelumnya hanya diturunkan hanya ke dalam 1 (satu) Tujuan Strategis. Walaupun kedua Tujuan Strategis tersebut berada pada lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah namun perlu pembedaan Tujuan Strategis yang jelas pada kedua Sub-Urusan tersebut.
6. Sasaran Strategis yang diturunkan dari Tujuan Strategis merupakan komposit dari masing-masing Tujuan Strategis. Indikator kinerja Sasaran Strategis pun harus dapat menjembatani antara Tujuan Strategis beserta Indikatornya dengan Nomenklatur Program yang telah dibakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

7. Untuk meningkatkan irisan kinerja (cross-cutting) strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di luar Tujuan RPD dan Sasaran RPD yang telah ditentukan. Salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah juga menargetkan Persentase Penduduk Miskin menjadi Pelaku UMKM. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang salah satunya melalui Pemberdayaan warga miskin lewat UMKM.
8. Sasaran Strategis ini lanjut diturunkan pada Tingkat Program dimana dari Nomenklatur Program yang telah ditentukan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga telah merumuskan Sasaran Program dimana pada kesempatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum terformalkan dan baru disusun saat penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
9. Sasaran Program yang diturunkan dari Sasaran Strategis juga merupakan komposit dari masing-masing Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Program pun harus dapat menjembatani antara Sasaran Strategis beserta Indikatornya dengan Nomenklatur Kegiatan beserta Indikatornya yang juga telah dibakukan
10. Walaupun Usulan Perbaikan Pohon Kinerja ini belum dibakukan dan diformalkan, namun usulan ini menjadi modal awal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Pohon Kinerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.8 PENGHARGAAN TAHUN 2024

Penghargaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3. 21 Penghargaan yang diterima sampai dengan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	KATEGORI			Deskripsi Penghargaan
					Internasional	Nasional	Internal Pemda	
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16 Agustus 2022	Piagam Penghargaan Pendaftaran 5000 Merek	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI		V		Piagam Penghargaan sebagai mitra kerja dalam melakukan pendampingan pendaftaran 5000 merek UMKM dibawah binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22 November 2022	Piagam Penghargaan Komisi Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta			V	Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik III Kategori Dinas dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	19 Juni 2023	Piagam Penghargaan Daerah Tertib Ukur 2022	Kementerian Perdagangan RI		V		Piagam Penghargaan sebagai Provinsi Tertib Ukur 2022
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	21 Juni 2023	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2022	Kementerian Perdagangan RI		V		Piagam Penghargaan kepada Pasar Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2022
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7 Juli 2023	Penghargaan Inabuyer Expo 2023	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI		V		Penghargaan untuk Jakarta Entrepreneur sebagai booth terbaik Pemerintah Daerah
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	September 2023	Penghargaan Jakarta Innovation Awards 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta			V	Penghargaan sebagai Inovasi Terbaik Perangkat Daerah pada Jakarta Innovation Awards 2023
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	26 September 2023	Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2023	Kementerian Perdagangan RI		V		Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2023
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Oktober 2023	Piagam Penghargaan Pendaftaran Merek 2023	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI		V		Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang berperan aktif melakukan Fasilitasi Pendaftaran Merek Tahun 2023
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha	09 November 2023	Penghargaan Peringkat 2 Kategori Media Sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			V	Penghargaan sebagai peringkat 2 kategori Media Sosial dalam Anugerah Humas Jakarta



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	KATEGORI			Deskripsi Penghargaan
					Internasional	Nasional	Internal Pemda	
	Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)			Pemerintah Provinsi DKI Jakarta				
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	09 November 2023	Penghargaan Peringkat 1 Kategori Inovasi Karya Kehumasan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			V	Penghargaan sebagai peringkat 1 kategori Inovasi Karya Kehumasan dalam Anugerah Humas Jakarta
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	09 November 2023	Penghargaan Peringkat 2 Kategori Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			V	Penghargaan sebagai peringkat 2 kategori Komunikasi Publik dalam Anugerah Humas Jakarta
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desember 2023	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta			V	Anugerah Penghargaan sebagai badan publik Informatif
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Walikota Administrasi Jakarta Timur)	14 Januari 2024	Penghargaan MURI Pasar UMKM Serentak	MURI		V		Penghargaan MURI kepada Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Rekor Pasar UMKM Serentak dengan Peserta Terbanyak
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Maret 2024	Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024	Kementerian Perindustrian RI		V		Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2023 Kategori Pemerintah Daerah Provinsi
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19 Maret 2024	Piagam Apresiasi SIINAS 2023	Kementerian Perindustrian RI		V		Piagam Apresiasi untuk pencapaian target SIINAS tahun 2023 sebanyak 1356 AKUN SIINas Industri Kecil (135,6%)
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Oktober 2024	Penghargaan Anugerah Primaniyarta	Kementerian Perdagangan RI		V		Penghargaan sebagai Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	18 November 2024	Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2023	Kementerian Perdagangan RI		V		Piagam Penghargaan sebagai Provinsi Tertib Ukur 2023
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	18 November 2024	Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2024	Kementerian Perdagangan RI		V		Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2024



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	KATEGORI			Deskripsi Penghargaan
					Internasional	Nasional	Internal Pemda	
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	18 November 2024	Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2024	Kementerian Perdagangan RI		V		Penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur, Daerah Peduli Perlindungan Konsumen dan 16 Pasar Tertib Ukur
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20 November 2024	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN	Badan Standardisasi Nasional		V		Penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah menerapkan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) dengan baik
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	22 November 2024	Penghargaan Peringkat 3 Kategori Media Audio Visual Unit Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		V		Penghargaan Peringkat 3 Kategori Media Audio Visual Unit Perangkat Daerah dalam acara Anugerah Humas Jakarta
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Unit Pengelola Metrologi)	22 November 2024	Penghargaan Peringkat 3 Kategori Sosok Humas Inspiratif	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		V		Penghargaan Peringkat 3 Kategori Sosok Humas Inspiratif dalam acara Anugerah Humas Jakarta
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29 November 2024	Anugerah Mitra Strategis Terbaik Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif	Bank Indonesia		V		Penghargaan Anugerah Mitra Strategis Terbaik Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13 Desember 2024	Penghargaan Penerapan Tata Kelola SPK (Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian) Level 3	Badan Standardisasi Nasional		V		Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi Dan Sertifikasi Produk PPKUKM serta Unit Pengelola Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik mendapatkan penghargaan tersebut dengan capaian index maturitas 2,5 dimana DPPKUKM memperoleh index tertinggi
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19 Desember 2024	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta		V		PPID Dinas PPKUKM memperoleh penghargaan Badan Publik Informatif berdasarkan e-Monev DKI Jakarta pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024







Gambar 3. 6 Dokumentasi Penghargaan Tahun 2024

Berdasarkan hasil penghargaan yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah berhasil mendapatkan penghargaan sebanyak 25 penghargaan dari kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 baik pada tingkat Nasional maupun tingkat internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Terdapat beberapa penghargaan yang secara konsisten telah diraih oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di antaranya terkait penghargaan Daerah Tertib Ukur dan penghargaan Perlindungan Konsumen
3. Penghargaan-penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam mengemban urusan-urusan yang menjadi kewenangannya.

3.9 RENCANA AKSI TAHUN 2025

Penjabaran dan pelaksanaan pencapaian kinerja strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dijadikan bahan evaluasi dan dasar perencanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dalam kerangka SAKIP pada aspek komponen (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Internal, adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

4. Penyusunan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025
5. Penyusunan Perencanaan Kinerja Individu Tahun 2025 yang diturunkan secara bertingkat berdasarkan Perencanaan Kinerja Organisasi melalui Matriks Pembagian Peran dan Hasil (MPPH) pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Tahun 2025
6. Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2026 yang sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026. Sebagai tahun terakhir pencapaian kinerja strategis Tahun 2023-2026, perlu memperhatikan target-target akhir periode agar dapat dijaga ketercapaiannya.
7. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan pohon kinerja yang menganut prinsip SMART-C (Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time bound dan Challenging) sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Pengukuran Kinerja



1. Melaksanakan pengukuran kinerja, berupa penginputan realisasi kinerja dan validasi penginputan realisasi kinerja baik pengukuran kinerja organisasi maupun pengukuran kinerja individu melalui aplikasi pengukuran kinerja yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu
2. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pemantauan progres pelaksanaan dan pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu di tingkat Perangkat Daerah

C. Pelaporan Kinerja

1. Mendokumentasikan dan menganalisis hasil dari penginputan dan pengukuran kinerja melalui dokumen-dokumen pelaporan, berupa Evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
2. Penyusunan laporan-laporan tersebut berpedoman pada sistematika yang telah disampaikan masing-masing koordinator pelaporan di tingkat Pemerintah Daerah

D. Evaluasi Internal

1. Melaksanakan rangkaian rapat dan pertemuan dalam rangka monitoring, pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kurun waktu masing-masing tahapan kinerja
2. Melaksanakan Evaluasi internal SAKIP telah dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dicantumkan pada Dokumen LKIP
3. Menelaah dan menindaklanjuti Hasil Hasil Evaluasi Internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4. Dalam mengatasi hambatan pencapaian Perjanjian Kinerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan melakukan rencana aksi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemantauan Industri Prioritas Kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Profil Industri Prioritas kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta dengan BPS dalam rangka penyamaan persepsi dan komitmen dalam pengisian Survei Industri Besar Sedang untuk perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



- b. Meningkatkan ekspor produk dan pelaku usaha ekspor DKI Jakarta melalui penjajakan kerjasama pengembangan eksor dengan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri pada 5 (lima) negara, pendampingan peningkatan mutu kualitas produk ekspor bagi 50 (lima puluh) pelaku usaha.
- c. Melakukan diseminasi program Jakarta Entreprenur melalui media sosial.
- d. Meningkatkan kerja sama pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui penjajakan kerjasama pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan lembaga pembiayaan.
- e. Melakukan pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM) Berkualitas.
- f. Melakukan pembinaan kewirausahaan Industri Baru (WUIB / hardskill).
- g. Melakukan pembinaan kewirausahaan Usaha Kecil Menengah (softskill).
- h. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) profiling koperasi berkualitas, monitoring pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta monitoring hasil pemeriksaan kesehatan koperasi tahun sebelumnya.
- i. Meningkatkan partisipasi Industri Prioritas Kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta dalam program/kegiatan melalui pelaksanaan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemetaan peluang Program/Kegiatan serta mengikutsertakan Industri Prioritas Kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Program/Kegiatan di lingkup Dinas PPKUKM sebanyak 10 (sepuluh) industri prioritas.
- j. Meningkatkan pelaksanaan dan partisipasi pemasaran pelaku usaha dalam dan luar kota serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian eorder dan omzet secara digital.
- k. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengukuran kinerja pada Sasaran Khusus.
- l. Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaporan P3DN, dan kendala atas sistem yang dihadapi.
- m. Monitoring dan evaluasi berkala atas progres capaian P3DN masing-masing Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- n. Membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas, detail, dan terperinci, pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal sehingga cukup waktu untuk proses pelaksanaan pekerjaan.



- o. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat ataupun dalam menyelesaikan tindak lanjut arahan Gubernur
- p. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian temuan, baik dengan BPKP, Pengadilan Negeri, BPKD, BPAD, Biro Hukum, Inspektorat atau BPN.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, telah melaksanakan seluruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024, dengan capaian pelaksanaan kinerja organisasi secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah maupun yang terdapat dalam Rencana Strategis dan telah diturunkan ke dalam kinerja individu sesuai dengan tingkatan jabatannya.
3. Sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan walaupun terdapat realisasi dari beberapa Sasaran Strategis yang belum rilis datanya. Dari 17 (tujuh belas) Sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis, 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional semua tercapai sesuai target bahkan ada yang di atas target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 102,4%.
4. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah tercapai sesuai dengan target dan mendukung pencapaian sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) telah tercapai sesuai dengan target dan beririsan (cross-cutting) kinerja dengan indikator kinerja yang bersifat strategis lainnya baik di lingkup internal Perangkat Daerah maupun di lingkup internal Pemerintah Daerah
6. Pencapaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran sebagaimana yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta Perubahannya telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Rata-rata Nilai Efisiensi Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebesar 99,10% dengan realisasi anggaran sebesar 93,65%



7. Perangkat Daerah telah mengutilitasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan secara komprehensif mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi secara mandiri, serta seluruh Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah seluruhnya ditindaklanjuti.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Memperhatikan analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya, dapat disampaikan saran berupa rekomendasi tindak lanjut, di antaranya:

1. Data realisasi capaian Sasaran Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang belum rilis agar dapat dianalisis lebih lanjut untuk dilaporkan kembali sebagai bahan monitoring dan evaluasi pencapaian Sasaran Kinerja Perjanjian Kinerja secara keseluruhan.
2. Menyusun ulang Pohon Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan memformulasikan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip SMART-C (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time bound* dan *Challenging*) sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Melaporkan pelaksanaan hasil input Evaluasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 di Tahun 2024
4. Memformalkan Matriks Pembagian Peran dan Hasil (MPPH) di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebagai langkah penjabaran Perencanaan Kinerja Organisasi ke dalam Perencanaan Kinerja Individu
5. Mencermati dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)